KIPRAH K.H. ABDUL WAHID HASYIM DALAM MASYUMI TAHUN 1943-1950

SKRIPSI

Disusun Untuk Memenuhi Tugas Akhir Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Program Studi Pemikiran Politik Islam

Oleh:

ACHMAD FATONI

NIM: E04213001

PROGRAM STUDI PIMIKIRAN POLITIK ISLAM

FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL

SURABAYA

2019

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : Achmad Fatoni

NIM : E04213001

Prodi : Pemikiran Politik Islam

Fakultas : Ushuluddin dan Filsafat

Alamat : Jl. Gayungsari Barat 08 No. 19. Surabaya.

Dengan ini peneliti mengatakan yang sesungguhnya bahwa :

1. Skripsi atau penulisan Kajian Pustaka ini adalah murni gagasan, rumusan, dan ide dari penulis dan bukan plagiat ataupun pernah dikumpulkan sebelumnya oleh penulis lainnya kepada lembaga pendidikan manapun.
2. Skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebut nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
3. Apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan terbukti penelitian ini adalah bentuk plagiasi maka penulis bersedia menerima sanksi akademik berupa pembatalan nilai yang telah diperoleh dalam karya ini.

Surabaya, 17 Desember 2019

Yang membuat pernyataan

Achmad Fatoni
NIM:E0421300

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi saudara Achmad Fatoni

Lamp : _

Yth. Dekan Fakultas Ushuluddin dan Filsafat
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Di Surabaya

Assalamualaikum wr.wb

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Achmad Fatoni

NIM : E04213001

Judul Skripsi : KIPRAH K.H. ABDUL WAHID HASYIM DALAM MASYUMI TAHUN 1943-1950

Sudah dapat diajukan kembali Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Prodi Pemikiran Politik Islam UIN Sunan Ampel Surabaya, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar strata satu dalam Pemikiran Politik Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat di munaqosyah. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Surabaya, 10 Desember 2019
Pembimbing

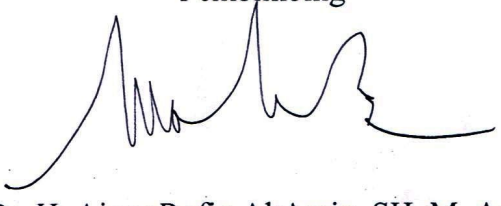

Dr. H. Ainur Rofiq Al Amin, SH, M, Ag.
NIP :197206252005011007

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi oleh Achmad Fatoni ini telah dipertahankan di depan

Tim Penguji Skripsi

Surabaya,18 Desember 2019

Mengesahkan

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Ushuluddin dan Filsafat

Dekan

Dr. Kunawi, M.Ag
NIP: 196409181992031002

Tim Penguji :

Ketua

Dr. H. Ainur Rofiq Al Amin, SH, M, Ag.

NIP: 197206252005011007

Sekertaris

Laili Bariroh M.Si.
NIP :197711032009122002
Penguji I

Holilah, S.Ag, M.Si
NIP:197610182008012008
Penguji II

Dr. Khoirul Yahya, S.Ag, M.Si
NIP :1972062007101003

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Achmad Fatoni

NIM : E04213001

Fakultas/Jurusan : Ushuluddin/Pimikiran Politik Islam

E-mail address : famey0200@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

■ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)

yang berjudul :

KIPRAH K.H. ABDUL WAHID HASYIM DALAM MASYUMI TAHUN 1943-1950

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 2 Januari 2020

Penulis

(Achmad Fatoni)

ABSTRAK

Nama: Achmad fatoni 2019, NIM: E04213001, dengan tema yang diangkat adalah Kiprah K.H. Abdul Wahid Hasyim Dalam Masyumi Tahun 1943-1950. Prodi Pemikiran Politik Islam Fakultas Ushuluddin dan Filsafat.

Abstrak: Skripsi ini mencoba mengangkat tema perihal Kiprah K.H. Abdul Wahid Hasyim Dalam Masyumi Tahun 1943-1950. Dalam Hal ini siapa yang tak kenal dengan sosok yang penuh multitalenta, seorang alumnus pesantren yang mampu berkiprah dalam perjuangan mewujudkan dasar negara yang bernuansa keislaman, dia K.H. Abdul Wahid Hasyim. Beliau merupakan sosok yang istimewa, betapa tidak, sebagai putra mahkota salah satu tokoh sekaligus ulama termuka negeri ini hadratusyekh K.H. M. Hasyim Asy'ari, beliau mendapatkan karomah dan kemuliaan tersendiri. K.H. Abdul Wahid Hasyim merupakan sesosok yang cerdas, akan tetapi usianya yang tak terlalu panjang menyebabkan tidak berkesempatan untuk menuangkan pemikirannya dalam karangan-karangan yang banyak.

Biografi dari K.H. Abdul Wahid Hasyim yakni di lahirkan pada hari Jum'at legi, 5 Rabi'ul Awal 1333 H. Atau 1 Juni 1914 M. Beliau merupakan anak kelima dan anak laki-laki pertama dari 10 bersaudara. Beliau dalam menuntut ilmu Kyai Wahid semenjak kecil untuk belajar keagamaannya di mulai dari Pondok Pesantren yang didirikan oleh sang ayah, lalu beliau meneruskan belajarnya keluar dari desa tebuireng semenjak umur 13 tahun, beliau meneruskannya ke Pondok Pesantren Siwalan, Panji, Sidoarjo dan Pondok Pesantren Lirboyo, Kediri. Ketika antara umur 15 tahun beliau menjadi Santri Kelana, pindah dari satu Pondok Pesatren ke Pondok Pesatren lainnya hingga Pada tahun 1929 beliau kembali ke Pondok Pesatren Tebuireng.

Dalam karirnya baik dalam bidang politik dan organisasi yakni Pada tahun 1939 K.H. Abdul Wahid Hasyim di percayai menjabat sebagai ketua MIAI (Majelis Islam A'la Indonesia), sebuah badan federasi NU, Muhammadiyah, PSII, PII, Al- irsyad, persis, beliau juga merupakan penggagas partai politik ialah diantaranya Partai Masyumi (1947) dan Partai Nahdatul Ulama (1950) sekaligus menjadi pemimpin organisasi Nahdaul Ulama, anggota BPUPKI, PPKI, dan menteri agama dalam tiga kabinet (Hatta, Natsir, Sukiman). Pada masa Masyumi telah berkembeng dan bertumbuh dengan baik banyak peristiwa yang terjadi dalam pembahasan yang selalu dilakukan pada setiap rapat agenda dalam persiapan keikut sertaan dalam pemilu di tahun 1955 hingga membahas tentang pengelolaan tata Negara serta asas dan ideologi Masyumi. Dalam hal ini Masyumi bisa di katakan bahwa Masyumi sebagai pemersatu umat pada masa pembentukan terjadi di karenakan banyaknya organisasi islam yang bergabung serta adapun yang di hapus dari anggota istimewah yang telah Masyumi bentuk di dalam sebuah AD/ART.

Kata kunci : Partai Masyumi, K.H. Abdul Wahid Hasyim.

.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI ii

PENGESAHAN SKRIPSI iii

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA iv

MOTTO v

PERSEMBAHAN vi

KATA PENGANTAR vii

ABSTRAK x

DAFTAR ISI xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 6

C. Tujuan Penelitian 6

D. Manfaat Penelitian 6

E. Tinjauan Pustaka 7

F. Landasan Teori 8

G. Metode Penelitian 11

H. Sistematika Pembahasan 14

BAB II SEKILAS PARTAI MASYUMI

A. Latar Belakang Berdirinya Masyumi 16

B. Visi dan Misi Partai Masyumi 23

C. Pertumbuhan Partai Masyumi 29

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Asas Partai Masyumi 29
2. Ideologi Partai Masyumi 30
D. Masyumi Pada Era Parlementer 31

BAB III RIWAYAT HIDUP K.H. ABDUL WAHID HASYIM

A. Asasl-usul K.H. Abdul Wahid Hasyim 47
1. Perjuangan K.H. Abdul Wahid Hasyim Dalam MIAI 51
2. Perjuangan K.H. Abdul Wahid Hasyim Dalam NU 51
B. Pendidikan K.H. Abdul Wahid Hasyim 52
C. Keluarga Besar K.H. Abdul Wahid Hasyim 57
D. Karya-Karya K.H. Abdul Wahid Hasyim 59

BAB IV PEMBAHASAN

A. Kiprah K.H. Abdul Wahid Hasyim Dalam Masyumi 63
B. Strategi Politik K.H. Abdul Wahid Hasyim Dalam Partai Masyumi pada 1943-1950 72
1. Perjuangan K.H. Abdul Wahid Hasyim Dalam Masyumi 76
2. Perjuangan K.H. Abdul Wahid Hasyim Dalam Liga Muslim 76
3. Perjuangan K.H. Abdul Wahid Hasyim Dalam Bidang Pendidikan 77

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 80
B. Saran 82
DAFTAR PUSTAKA 83

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

K.H. Abdul Wahid Hasyim merupakan tokoh sangat intens mencermati perkembangan politik. Hal tersebut menunjukkan bahwa ia memang memiliki minat dalam bidang politik dan juga ikut andil dalam politik di Indonesia. Ia membagi masyarakat dan kelompok pergerakan di Indonesia dalam tiga golongan, yaitu : 1) Nasionalis Sekuler, golongan ini adalah golongan yang tidak begitu banyak memiliki antusiasme dalam religiusitas. 2) Nasionalis Islam, golongan ini adalah golongan yang sangat memiliki semangat tinggi dalam keagamaan. Saat pembentukan kementerian agama, golongan ini sangat mendukung dalam berdirinya kementrian tersebut. 3) Komunis Sosialis, golongan ini mrupakan golongan minoritas agama.[1] pembagian Tiga kategori tersebut bisa dikerucutkan menjadi dua kategori. Yaitu golongan lunak dan golongan radikal. Penggolongan dua kategori ini merupakan analisis dari seorang pengamat politik atau politisi modermis.

Dalam pandangan K.H. Abdul Wahid Hasyim ia menilai bahwa penjajahan jepang menciptakan sebuah sistem pemerintahan yang diktator. Dalam pemerintahan tersebut yang berkuasa adalah militer jepang. Jepang

[1] Azyumardi Azra, Saiful Umam, ed, *Menteri-menteri Agama RI: Biografi Sosial-Politik*, (Jakarta: PPIM, 1998), hal. 90.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak memberikan kebebasan di waktu damai, mereka bahkan memerangi pemerintah sipil atau seluruh warga negara Indonesia.

K.H. Abdul Wahid Hasyim mengamati politik secara global tidak hanya di Indonesia. Ia dapat mengakses semua perkembangan politik dunia karena pergaulannya yang luas. Selain itu ia juga gemar membaca, dan berlangganan media cetak baik dari Eropa maupun Timur Tengah. Semua hal tersebut adalah modal dasar yang ia lakukan dalam mengikuti perkembangan politik di berbagai negara.

K.H. Abdul Wahid Hasyim dilahirkan pada hari Jumat legi, tanggal 5 robi'ul awal, tahun 1333 H atau 1 Juni 1914 M. Ia merupakan sosok yang istimewa dan cerdas, sebagai putra dari salah satu tokoh sekaligus ulama terkemuka negeri ini yaitu K.H. M. Hasyim Asy'ari, Ia mendapatkan karomah dan kemuliaan tersendiri.[2] Dalam usianya yang tak terlalu panjang, menyebabkan ia tidak memiliki berkesempatan untuk menuangkan pemikirannya dalam karangan-karangan yang banyak. Ia wafat pada tahun 1953 dalam melakukan perjalanan dinas ke Cimahi.

Kyai Wahid memang tidak seperti ayahnya yang telah melahirkan beberapa karya penting, Kyai Wahid tidak memiliki kesempatan untuk itu. Ia selain seorang ulama besar yang luar biasa subangsihnya terhadap bangsa-negara, agama, NU, Masyumi, Pesantren Tebuireng. Ialah adalah ayahanda dari mantan Presiden Indonesia keempat, K.H. Abdurrahman Wahid alias Gus Dur. Kepergiannya meninggalkan bekas memori luar biasa untuk

[2] Mohammad Rifai, *Biografi Singkat Wahid Hasyim [1914-1953]*, cet. ke-2 (Yogyakarta: Garasi, 2014), hal.5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perjuangan Bangsa Indonesia. Untuk itu, dengan adanya penjelasan seperti di atas membuat penulis sangat tertarik untuk membicarakan megenai sosok K.H. Abdulul Wahid Hasyim yang telah memberikan ilmu dan pemikirannya yang luar biasa untuk negeri ini. Melihat latar belakang keluarga, sosial dan pendidikannya yang berasal dari kalangan tradisionalis maka sangat menarik untuk dianalisis tentang jiwa nasionalisnnya yang berasal dari seorang santri.[3]

Pada pembahasan ini Ia adalah selain tokoh ulama atau Kyai, Ia merupakan penggagas partai politik yakni diantaranya Partai Masyumi (1945) dan Partai Nahdatul Ulama (1950). Dalam memulai karirnya di dunia politik Kyai Wahid memulai dari sebagai ketua direktur dari sebuah majalah bulanan milik NU yakni "*Suluh Nahdatul Ulama"* yang merupakan mimbar dan menara NU yang ia kendalikan di saat ia juga menjadi pengasuh Pondok Pesantren yang didirikan oleh sang ayahanda di Tebuireng Jombang.

Tepat pada tahun 1939, K.H. Abdul Wahid Hasyim menjadi ketua MIAM (Majelis Islam A'la Indonesia), sebuah badan federasi Nu, Muhamadiyah, PSII, PII, Al-Irsyad, dan Persis.[4] Setelah beberapa lama aktif diberbagai Organisasi kemudian K.H. Abdul Wahid Hasyim menjadi tokoh dari beberapa tokoh seorang pendiri Partai Politik Majelis Syuro Muslimin Indonesia (MASYUMI) tepatnya pada bulan November 1945, dia bersama M. Natsir menjadi pelopor pelaksanaan kongres Umat Islam Indonesia pada tanggal 7-8 November 1945 bertempat di gedung Muallimin kota

[3] Mohammad Rifai, *Biografi Singkat Wahid Hasyim [1914-1953],* cet. ke-2 (Yogyakarta: Garasi, 2014), hal . 99.
[4] Mohammad Rifai, *Biografi Singkat Wahid Hasyim [1914-1953],* cet. ke-2 (Yogyakarta: Garasi, 2014), hal. 29

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Yogyakarta. K.H. M. Hasyim Asy'ari sebagai Ketua Umum Partai Masyumi, akan tetapi dalam menjalankan tugasnya sebagai Ketua Umum Partai Masyumi, Ia melimpahkan tugasnya kepada K.H. Abdul Wahid Hasyim untuk mengurusinya.

Partai Masyumi di bentuk karna adanya sebuah maklumat pemerintah pada tanggal 3 November 1945 yang berisi anjuran untuk mendirikan Partai Politik. Dalam hal ini perlu diketahui bahwa sejatinya awal mula Partai Masyumi ialah Badan Organisasi yang dibentuk oleh Jepang dan menjadi pengganti dari Badan Organisasi MIAI pada saat tahun 1943, pada tahin yang sama pula ia menjadi bagian dari anggota Masyumi pusat.[5]

Di Indonesia peran pertama Masyumi sebagai alat politik yang bertujuan untuk merespon langsung keadaan revolusi yang sedang berlangsung di Indonesia, hal tersebut sesuai dengan program perjuangan Masyumi yang ditegaskan pada tanggal 17 Desember 1945. Masyumi sebagai organisasi yang memiliki ideologi Islam yang tidak ingin bekerja sama dengan PKI dan sangat menentang komunisme sangat didukung oleh Umat Islam karena telah memberikan andil yang besar dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dari belenggu penjajah secara fisik dan non fisik. [6]

Masyumi sebagai partai Islam mempejuangkan Islam sebagai ideologi negara di era kemerdekaan. Masyumi yang merupakan salah satu simbol

[5]Aboebakar Atjeh, *Sejarah hidup K.H. Abdul Wahid Hasyim,* cet. Ke-1 (Jombang: Pustaka Tebuireng, 2015), hal.176

[6] Katimin, *Islam Politik di Indonesia:Membuka tabir Perjuangan Islam Ideologis dalam Sejarah Politik Nasional*, (Bandung: Cita Pustaka Media, 2007), hal 161.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

politik di Indonesia akhirnya dibubarkan oleh presiaden Ir.Soekarno setelah proklamasi pada tahun 1945.

Partai Masyumi merupakan simbo Islam politik dalam parlemen. Dan sempat terjadi perdepatan yang alot antara kubu Masyumi dan lawan politiknya dalam membahas ideologi negara di parlemen. Perdebatan tersebut menjadi salah satu penyebab dibubarkannya Majelis Konstituante dengan dikeluarkannya dekrit presiden tanggal 5 juli 1959 dan dinyatakan kembali ke Undang-undang Dasar 1945.

Setelah beberapa tahun kemudian tepatnya pada sejak awal tahun 1950-an NU keluar dari Masyumi dan mendirikan Partai sendiri. Kyai Wahid terpilih sebagai Ketua Umum Partai NU. Keputusan ini diambil dalam kongres ke-19 NU di Kota Palembang (26 april-1 mei 1952). Pada saat NU mengeluarkan diri dari Partai Masyumi K.H. Abdul Wahid Hasyim tidak setuju NU keluar dari Masyumi. Akan tetapi karena sudah menjadi keputusan bersama, maka Kyai Wahid menghormatinya, hubungan Kyai Wahid dengan tokoh-tokoh Masyumi tetap terjalin baik.

Adapun disatu sisi K.H. Abdul Wahid Hasyim bersama NU serta Partai Masyumi telah membawa dirinya menjadikan salah satu jajaran dari Panitia Sembilan yang dibentuk langsung oleh Bung Karno karena situasi gawat sehubungan dengan Perang Pasifik yang ada di Asia. Tugas Panitia Sembilan adalah mencari rumusan yang kompromistis yang diterima oleh semua golongan yang ada saat itu. Pada akhirnya Panitia Sembilan tersebut menghasilkan Piagam Djakarta (Djakarta Charter) yang di dalamnya memuat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

rumusan dasar Negara. Piagam Djakarta merupakan dokumen politik yang telah mempersatukan gagasan ketatanegaraan atas persatuan Nasional dalam rangka menyongsong Negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat.[7] Oleh karena itu dari deskripsi tersebut penulis menfokuskan pada penelitian ini dengan judul "KIPRAH K.H. ABDUL WAHID HASYIM DALAM MASYUMI TAHUN 1943-1950**".**

B. Rumusan masalah

Sesuai dengan latar belakang yang sudah di uraikan, maka ditemukan sebuah rumusan masalah tentang: bagaimana kiprah K.H. Abdul Wahid Hasyim dalam Partai Masyumi?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang sudah diuraikan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk untuk mengetahui kiprah K.H. Abdul Wahid Hasyim dalam Partai Masyumi.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah guna untuk:

1. Bagi dunia pendidikan, penulisan ini dapat berguna untuk menambah informasi dan menambah khasanah pengetahuan tentang kiprah K.H. Abdul Wahid Hasyim dalam Partai Masyumi.

[7] Mohammad Rifai, *Biografi Singkat Wahid Hasyim [1914-1953]*, cet. ke-2 (Yogyakarta: Garasi, 2014), hal.81.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Bagi para pembaca, penulisan ini guna bisa dapat memperluas pengetahuan tentang kiprah K.H. Abdul Wahid Hasyim dalam Partai Masyumi.
3. Bagi mahasiswa, penulisan ini dibuat agar bisa dijadikan bahan kajian dalam pengetahuan dan pemahaman tentang kiprah K.H. Abdul Wahid Hasyim dalam Partai Masyumi.

E. Tinjauan Pustaka

Dalam hal ini sebelum penulis mengangkat judul ini sebagai judul skripsi di antaranya ada beberapa penelitian yang serupa ialah:

1. Ferhadz Ammar Muhammad "Pemikiran Siyasah Islamiyyah K.H. Abdul Wahid Hasyim". Dalam penelitian ini ialah membahas tentang pola pikir dan konsepsi ketuhanan serta kedaulatan rakyat yang digagas oleh K.H. Abdul Wahid Hasyim.
2. Ahmad Danuji "Pemikiran K.H. Abdul Wahid Hasyim tentang Islam dan Kewargaan". Dalam penelitian ini ialah membahas tentang apa yang pernah jadi perdebatan sengit terhadap adanya Sila Pertama yang ada di pacasila oleh K.H. Abdul Wahid Hasim dengan para tokoh yang ada dalam pertemuan tersebut yakni Sila Pertama yang berbunyi "Ketuhanan Yang Maha Esa dengan menjalankan Syariat Islam bagi para pemeluknya" serta membahas tentang pemikiran kewargaan lainnya yang menjadi bagian dari pemikiran K.H. Abdul Wahid Hasyim.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Ahmad Nadirin, “Kiprah Politik K.H. Abdul Wahid Hasyim (1938-1953)”. Pada peneitian ini membahas riwayat K.H. Abdul Wahid Hasyim putera KH. Abdul Hasyim Asy'ari tentang kiprah-kiprahnya di dunia politik Indonesia.Wahid Hasyim mulai aktif di pimpinan NU tahun 1938, dan keterlibatannya dirasakan menambah kekuatan tersendiri bagi perkumpulan ini. Karirnya di organisasi melaju cepat, 2 tahun kemudian (1940) K.H. Abdul Wahid Hasyim ditunjuk sebagai penanggung jawab dan ketua departemen Ma'arif (pendidikan). Dalam kedudukan ini ia mempunyai kesempatan untuk mengadakan perubahan dan pembaharuan madrasah-madrasah NU di seluruh Indonesia. Menjelang kemerdekaan RI ia masuk menjadi anggota termuda dalam BPUPKI.
4. Riky Haryanto, “K.H. Abdul Wahid Hasyim Studi Analisis tentang Pemikiran, Kiprah, dan Perjuangan”. Penelitian ini membahas beberapa dari sebuah analisis terkait tentang sebuah perjalanan seorang K.H. Abdul Wahid Hasyim pada masa beliau memulai menata karirnya dalam segi pemikiran dan sebuah kiprah untuk ikut memperjuangkan kemerdekaan Indonesia.

F. Landasan Teori

Dalam hal ini teori yang digunakan pada penulisan ini adalah pendekatan sosiologis dengan perspektif teori peran. Pendeketan sosiologis digunakan karena K.H. Abdul Wahid Hasyim merupakan sosok orang yang paling berpengaruh di barisan para ulama Nahdlatul Ulama serta Partai

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Masyumi. Sedangkan teori peran dipakai sebagai instrumen analitik dalam mengamati kontribusi K.H. Abdul Wahid Hasyim pada Partai Masyumi. Teori peran menurut George Herbert Mead sebagaimana dalam buku *mind, self, and society*, menguraikan tahap pengembangan diri manusia. Manusia yang baru lahir belum mempunyai diri. Diri manusia berkembang secara bertahap melalui interaksi dengan anggota masyarakat lain.

Sebelum memasuki dimensi epistimologis dalam pemikiran George Herbert Mead, mula-mula ia dipengaruhi oleh teori evolusi Darwin yang menyatakan bahwa organisme terus-menurus terlibat dalam usaha menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Di samping itu, Mead juga dipengaruhi oleh idealisme Hegel dan John Dewey, bahwa manusia mempunyai kemampuan untuk menanggapi diri sendiri secara sadar, dan kemampuan tersebut memerlukan daya pikir tertentu, khususnya daya pikir reflektif. Namun, adakalanya terjadi tindakan manusia dalam interaksi sosial munculnya reaksi secara spontan dan seolah-olah tidak melalui pikiran dan hal ini biasa terjadi pada binatang. Teori Peranan *role theory*, sebagaimana menurut George Herbert Mead, merupakan sekumpulan tingkah laku yang dihubungkan dengan suatu situasi tertentu. Peran yang berbeda membuat jenis tingkah laku yang berbeda pula. Tetapi apa yang membuat tingkah laku itu sesuai dalam suatu situasi dan tidak sesuai dalam situasi lain relatif bebas pada seseorang yang menjalankan kiprah tersebut.[8]

[8]Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar, (*Jakarta: Rajawalin Press,2002*),* hal. 221.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Peran dalam konteks organisasi/lembaga berkaitan dengan tugas dan fungsi, yaitu dua hal yang tidak dapat dipisahkan dalam pelaksanaan pekerjaan oleh seseorang atau lembaga. Tugas merupakan seperangkat bidang pekerjaan yang harus dikerjakan dan melekat pada seseorang atau lembaga sesuai dengan fungsi yang dimilikinya. Fungsi suatu lembaga atau institusi formal adalah adanya kekuasaan berupa hak dan tugas yang dimiliki oleh seseorang dalam kedudukannya di dalam organisasi untuk melakukan sesuatu sesuai dengan bidang, tugas, dan wewenangnya masing-masing.[9]

Dalam hal ini peran K.H. Abdul Wahid Hasyim yang beliau lakukan pada Partai Masyumi beliau benar-benar memposisikan dirinya selain menjadi tokoh ulama tapi beliau juga memposisikan dirinya sebagaimana fungsi dan haknya menjadi anggota Partai Masyumi, yang mana kedudukan beliau adalah Ketua II dan perangkap dari jabatan sang ayah menjadi Ketua Umum di karenakan sang ayah mengurusi Pondok Pesantren yang telah didirikannya. Dengan penjelasan tersebut dan yang ada di dalam pembahasan maka teori peran yang penulis uraikan ialah sesuai dengan apa yang di lakukan oleh K.H. Abdul Wahid Hasyim dalam Partai Masyumi selaku lembaga atau institusi yang berbidang dalam pengembangan masyarakat dan kemaslahatan Negara.

Adapun dalam hal lain secara kajian akademik mengenai sebuah Teori politik merupakan bahasan dan generalisasi dari fenomena yang bersifat politik. Dengan kata lain, teori politik adalah bahasan dan renungan atas

[9] Muammar Himawan, *Pokok-Pokok Organisasi Modern*, (Jakarta: Bina Ilmu, 2004), hal. 51.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tujuan dari kegiatan politik, cara-cara mencapai tujuan, kemungkinan dan kebutuhan yang ditimbulkan oleh situasi politik. Konsep yang dibahas dalam teori politik yaitu masyarakat, kelas sosial, negara, kekuasaan, kedaulatan, hak, dan kewajiban, kemerdekaan, lembaga-lembaga negara, perubahan sosial, pembangunan politik, dan modernisasi. Penulis dalam penelitian ini menggunakan teori politik dikarenakan mengenai "partai politik", pertumbuhan dan perkembangan partai politik yang ada di Indonesia yaitu untuk terlaksananya suatu tujuan dari sekelompok orang untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik. Dalam teori politik, berdirinya sebuah partai karena ingin mewujudkan tujuan dari berbagai golongan untuk kepentingan yang sama. Pertumbuhan partai politik diawali dengan berdirinya partai Islam pertama di Indonesia yaitu partai Masyumi. Partai Masyumi diikuti dari berbagai organisasi dan sosial keagamaan yang bersatu dalam Partai Masyumi untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan bersama demi kemajuan bangsa Indonesia.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Untuk mengumpulkan data yang dipakai penulis melakukan penelitian kepustakaan (*library reseach*) yankni suatu penelitian yang obyek utamanya menggunakan bahan-bahan tertulis seperti manuskrip, buku, majalah, surat kabar, dan dokumen lainnya yang ada kaitannya dengan permasalahan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Pengumpulan Data

Adapun pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode dokumentasi; yakni dilakukan dengan cara membaca, mempelajari, menelaah, biografi K.H. Abdul Wahid Hasyim dan buku-buku serta tulisan-tulisan yang mempunyai relevansi dengan permasalahan ini.

3. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah: buku karangan dari Mohammad Rifai "Wahid Hasyim (biografi singkat 1914-1953)", buku karangan dari seri buku tempo tentang "Wahid Hasyim-Untuk Republik Dari Tebuireng", buku karangan H. Aboebakar Atjeh "Sejarah Hidup K.H. A. Wahid Hasyim", Kuntowijoyo. *Pengantar Ilmu Sejarah*, (Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya, 2001), Nanang Tahqiq, *Politik Islam*, (Jakarta: Prenada media, 2004), Muhammad Iqbal dan Amin Husein Nasution, *Pemikiran Politik Islam: Dari masa Klasik hingga Indonesia Kontemporer*, (Jakarta: Kencana,2013), Soerjono Soekanto, *sosiologi suatu pengantar, (*Jakarta: Rajawalin Press, 2002*),* Muammar Himawan, *Pokok-Pokok Organisasi Modern*, (Jakarta: Bina Ilmu, 2004), Deddy Mulyana, *Metode Penelitian Kualitatif (Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya),* cet. ke-7, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2010), Soejono

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan Abdurrahman, *Metode Penelitian Hukum,* cet, 3 (Jakarta: Rineka Cipta, 2003).

b. Sumber Data Sekunder

Data yang dimaksud adalah berbagai bahan yang tidak langsung berkaitan dengan objek dan tujuan dari pada penelitian ini, bahan tersebut diharapkan dapat melengkapi dan memperjelas data-data primer.[10]

Selain dari karya-karya ini, bisa dikategorikan sebagai sumber data sekunder. Misalnya, jurnal Insan Fahmi Siregar, Thaqafiyyat, Vol.14, No.1, 2013, tentang pasang surut peran politik partai masyumi dalam pemerintahan tahun 1945-1960. Blog tentang K.H. Abdul Wahid Hasyim.

4. Analisis Data

Dalam penelitian ini metode pengolahan data yang dipakai adalah deskriptif analisis, yakni suatu analisa yang berangkat dari mendeskripsikan kiprah dari K.H. Abdul Wahid Hasyim dalam Masyumi yang kemudian diselami dan diinterpretasi serta memberi kesimpulan.

Kiprah dari K.H. Abdul Wahid Hasyim dalam Masyumi yang dijadikan obyek materil dalam penelitian ini kemudian akan dianalisis dengan menggunakan metode analisa data deskriptif-analisis. Metode deskriptif digunakan dalam rangka untuk memberikan gambaran yang

[10] Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Andi Offset, 1989), hal.53.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ada, serta memberikan interpretasi terhadap objek penelitian ini.[11] Sedangkan metode analisis digunakan untuk melakukan pemeriksaan (analisis) secara konsepsional atas makna yang termuat dalam berbagai istilah yang digunakan dan berbagai pernyataan yang dibuat dalam penelitian ini.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah penulisan skripsi ini, maka akan disusun secara sistematis agar mendaptkan hasil penelitian yang kronologis dan sistematis. Adapaun sistematika pembahasan dalam penulisan skripsi ini adalah:

Bab Satu: Pendahuluan yang mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, landasan teori, metode penelitian, serta sistematika pembahasan.

Bab Kedua: Sekilas tentang Masyumi, berisi Latar Belakang Berdirinya Masyumi, Visi dan Misi Politik Masyumi, dan Perkembangan Masyumi.

Bab Ketiga: Riwayat Hidup K.H. Abdul Wahid Hasyim, berisi tentang, Asal-usul K.H. Abdul Wahid Hasyim, Pendidikan K.H. Abdul Wahid Hasyim dan Keluarga Besar K.H. Abdul Wahid Hasyim.

[11] Anton Baker dan Charis Zubair, *Metode Penelitian Filsafat* (Yogyakarta: Kanisius, 1990), 27.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab Keempat: Pembahasan, berisi tentang Kiprah K.H. Abdul Wahid Hasyim dalam Perkembangan Partai Masyumi, Strategi Politik K.H. Abdul Wahid Hasyim dalam Partai Masyumi pada 1943-1950.

Bab Kelima: Penutup, yang berisi kesimpulan dan saran-saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

SEKILAS TENTANG MASYUMI

A. Latar Belakang Berdirinya Masyumi

Sejarah perkembangan partai politik yang berbasis Islam sudah ada sejak zaman Belanda. Kemudian partai-partai politik yang berbasis islam dan nasionalis dibubarkan pada masa pendudukan Jepang. Sebagi gantinya Jepang membentuk organisasi MIAI (*Majelis Islam A'la Indonesia*) yang pada tahun 1943 dibubarkan dan digantikannya dengan membentuk organisasi Masyumi (*Majelis Syuro Muslimin Indonesia*).[1] Organisasi Masyumi (*Majelis Syuro Muslimin Indonesia)* dibentuk pada tanggal 24 Oktober 1943, menggantikan MIAI yang tidak disukai Jepang dikarenakan tidak bisa dikendalikan oleh pemerintah Jepang. Sedangkan dalam organisasi Masyumi ialah merupakan gabungan dari orangisasi muslim seperti Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Persatuan Islam.[2] Masa pendudukan Jepang dalam hal ini merupakan proses kelahiran Masyumi. Pemerintahan militer Jepang, melalui kebijakan politiknya berupaya ingin memasukkan Islam Indonesia sebagai bagian dari terjadinya politik dalam perang. Kemudian pada Oktober 1943, lahirlah Masyumi (*Majelis Syuro Muslimin Indonesia*).[3] Mengenai hubungan antara Masyumi dengan partai islam yang didirikan pada bulan November 1945

[1] Moch. Nurhasin, *Masa depan Partai Islam di Indonesa*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), p. 41

[2] Musyrifah Sunanto, *Sejarah Peradaban Islam Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2005), P. 40.

[3] Remy Madinier, *Partai Masjumi: Antara Godaan Demokrasi dan Islam Integral*. (Bandung: Mizan, 2013),p.46.

lebih rumit. Karena dalam pembagian peran antara para ulama sebagai tokoh pemimpin dari perkumpulan-perkumpulan besar islam (*Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama*), sedangkan dalam sisi lain ada dari para tokoh politisi gerakan Sarekat Islam. Pihak yang pertama dari kalangan ulama menjadi pemimpin Masyumi pada masa pemerintahan Jepang. Sedangkan pihak dari para tokoh politisi Sarekat Islam menduduki sebuah kedudukan menjadi jajaran eksekutif.

Dalam hal ini Jepang berhasil menemukan Islam Asia dan mengangkatnya sebagai salah satu proses utama dalam hal politik. Jepang mengirim sejumlah mahasiswa untuk belajar di Mesir demi untuk memprokgandakan Islam yang menjadi mayoritas keagamaan di Indonesia. Tepat pada tahun 1939 Tokyo menjadi tuan rumah konferensi Pan-Islamis yang mana dihadiri para wakil MIAI. Pemerintah Jepang dengan adanya hal ini langsung membuat landasan tumpuan ditengah masyarakat Islam Indonesia dalam rangka memobilisasi dukungan penduduk atau rakyat Indonesia.

Setelah memobilisasi dukungan terhadap rakyat Indonesia pemerintahan Jepang berupaya menolak terhadap segala bentuk sekpresi politik Islam. Kemudian Jepang membentuk organisasi-organisasi sendiri untuk mengendalikan Islam Indonesia diantaranya: Komite Persiapan Persatuan Ummat Islam diketuai oleh Abikusno Tjokjrosujoso serta Biro Urusan Agama (*Shumubu*) yang pada mulanya dipimpin oleh orang Jepang kemudian pada tahun 1944 dialihkan kepada seorang tokoh ulama tradisional

yaitu K.H. Hasyim Asy'ari. Untuk memiliki organisasi masa pemerintah Jepang memberikan izin untuk pendirian MIAI pada September 1942 dengan sebuah upaya untuk memegang peran penting dalam kerangka Tiga A (*Jepang Pemimpin Asia, Jepang Pelindung Asia, Jepang Cahaya Asia*).[4]

MIAI (*Miajelis Islam A'la Indonesia*) didirikan atas izin dari pemerintah Jepang sebagai wadah dari organisasi-organisasi Islam. MIAI berdiri sebelum Masyumi (*Majelis Syuro Muslimin Indonesia*), dengan tujuan-tujuan yang sangat mulia dengan menggabungkan segala potensi Umat Islam, sebagai berikut:

1. Menggabungkan segala perhimpunan Umat Islam Indonesia untuk bekerja bersama-sama.
2. Berusaha mengadakan perdamaian apabila timbul pertikaian diantara golongan Umat Islam Indonesia, baik yang sudah tergabung dalam MIAI maupun yang belum.
3. Mempereratkan perhubungan antara Umat Islam Indonesia, dengan Umat Islam di luar Indonesia.
4. Berdaya upaya untuk keselamatan agama Islam dan Umatnya.
5. Mengadakan bersama Kongres Muslimin Indonesia (KMI).[5]

Poin terakhir dari tujuan didirikannya MIAI, kemudian diwujudkan oleh para tokoh Islam dan para tokoh politisi dari gerakan Sarekat Islam dalam kongres di Yogyakarta yang melatar belakangi mewujudkan berdirinya Partai Masyumi. Sebelumnya pada dasarnya MIAI hanya gerakan sosial

[4] *Ibid*, p.46.
[5] Artawijaya, *Belajar dari Partai Masyumi*. (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014), p.53.

keagamaan. Akan tetapi semangat yang ada untuk bersatu dan membela kepentingan Umat Islam sudah sejak sebelum berdirinya Partai Politik.

Indonesia yang menjadi bagian dari organisasi yang didirikan Jepang, dalam hal ini Indonesia telah menyadari bahawa niat baik Jepang hanya untuk memperalat kalangan Islam untuk mencapai suatu tujuannya, yaitu berupa mendukung usaha peperangan Jepang. Niat yang di berikan Jepang untuk bekerja sama dengan para ulama tidak tercapai ketika adanya kecerobohan tentara Jepang saat mengadakan *Sakeirei.*[6] Satu sisi dipihak ulama sulit untuk menerima kegiatan *sakeirei* karena kemiripan dengan melakukan ibadah shalat yang menghadap ke Makkah. Kiai Hasyim Asy'ari dan Kiai Muhammad Siddiq dua tokoh pemimpin Nadhlatul Ulama ini dijebloskan ke penjara di karenakan menolak untuk membungkukkan badan dalam upacara penghormatan *sakeirei* yang dilakukan pemerintah Jepang. Anggota dan pengurus MIAI satu persatu mulai mengundurkan diri. Kemudian beberapa anggota dari MIAI yang mengundurkan diri membentuk sebuah perkumpulan mengadakan kegiatan membantu orang yang tidak mampu, dengan cara mengumpulkan zakat. Kegiatan ini disebut *Bait Al-Mal* dan meraih keberhasilan dalam waktu singkat. Kegiatan MIAI yang meluas meliputi 35 kresidenan di Jawa mulai menyaingi Biro Urusan Agama yang menjadi organisasi resmi untuk pengendalian Islam di daerah. Kemudian atas campur tangan otoritas militer organisasi MIAI dihentikan.[7]

---

[6] Sakeirei yaitu upacara penghormatan pada Kaisar dengan cara membungkukkan badan dan menghadap kearah Tokyo.

[7] Remy Madinier, *Partai Masjumi: Antara Godaan Demokrasi dan Islam Integral*. (Bandung: Mizan,2013),p.47

Pembentukan Masyumi dalam hal ini tidak terlepas dari faktor-faktor yang melatarbelakanginya seperti, suasana revolusi dan persaingan berbagai kelompok ideologi di Indonesia setelah adanya proklamasi kemerdekaan. Peran tokoh-tokoh yang mengambil inisiatif ikut mewarnai pembentukan Masyumi. Partai Masyumi didirikan dan di ikrarkan sebagai satu-satunya partai politik Islam pada tanggal 7 November tahun 1945 berdasarkan Kongres Umat Islam di Yogyakarta yang diselenggarakan pada tanggal 7-8 November 1945 bertepatan dengan 1-2 Dzulhijjah 1346 H. Inisiatif pembentukan Masyumi berasal dari sejumlah tokoh partai politik dan gerakan sosial keagamaan Islam sejak zaman pergerakan, seperti Agus Salim, Prof. Abdul Kahar Muzakkir, K.H. Abdul Wachid Hasyim, Mohammad Natsir, Mohammad Roem, Prawoto Mangkusasmito, Dr. Sukiman Wirosanjojo, Ki Bagus Hadikusumo, Mohammad Mawardi, dan Dr. Abu Hanifah.[8]

Keputusan pembentukan Partai Masyumi oleh sejumlah tokoh Islam tidak sekedar sebagai keputusan tokoh, tetapi keputusan dari seluruh Umat Islam melalui utusan-utusan. Susunan kepengurusan Partai Masyumi terdapat dari wakil-wakil partai politik dan gerakan sosial keagamaan Islam, sebagai berikut:

a. Majelis Syuro (Dewan Partai)

   - Ketua Umum

   Hadratus Syeikh K.H. Hasyim Asy'ari (NU)

   - Ketua Muda I

[8] Samsuri, *Partai Islam Anti Komunis: Pergumulan Masyumi dan PKI di Arena Demokrasi Liberal*.(Yogyakarta: Safira Insania Press, 2004),p.10

Ki Bagus Hadikusumo (Muhammadiyah)

- Ketua Muda II

K.H. Abdul Wachid Hasyim (NU)

- Ketua Muda III

Mr. Kasman Singodimedjo (Muhammadiyah)

- Anggota:

R.H. M. Adnan (Persatuan Penghulu dan Pegawainya, PPDP)

H. Agoes Salim (Penjadar)

K.H. Abdul Wahab (NU)

K.H. Sanusi (PUI)

K.H. Abdul Halim (PUI)

Syekh Djamil Djambek (Majelis Tinggi, MIT)

b. Pengurus Besar

- Ketua

Dr. Sukiman Wirosandjojo (PII)

- Ketua Muda I

Abikusno Tjokrosujoso (PSII)

- Ketua Muda II

Wali Alfatah (PII)

- Sekertaris I

Harsono Tjokroaminoto (PSII)

- Sekertaris II

Prawoto Mangkusasmito (Muhammadiyah)

- Bendahara

Mr. RA Kasmat (PII)

- Pemimpin Bagian Penerangan:

Wali Alfatah (PII)

- Bagian Barisan Sabilillah dan Hizbullah:

K.H. Masjkur (NU)

W. Wondoamiseno (PSII)

H. Hasjim (Muhammadiyah)

Sulio Hadikusumo (JIB)

- Bagian Keuangan:

Mr. RA Kasmat (PII)

R. Prawiro Juwono (Muhammadiyah)

H. Hamid BKM (Muhammadiyah)

Harsono Tjokroaminoto (PSII)

- Anggota-anggota:

K.H. Dahlan (NU)

H.M farid Ma'ruf (Muhammadiyah)

Junus Anis (Muhammadiyah)

K.H. Fathurrahman (NU)

Dr. Abu Hanifah

Mohammad Natsir (Persis)

S.M Kartosuwirjo (PSII Baru)

Anwar Tjokroaminoto (PSII)

Dr. Sjamsuddin (Muammadiyah)

Mr. Mohammad Roem (Penjadar)

Dalam Perkara-perkara besar yang dianggap penting dalam pembentukan Partai Masyumi adalah menyikapi suasana revolusi Indonesia dan persaingan berbagai ideologi politik dalam masyarakat Indonesia. Tujuan Partai Masyumi pada Kongres Umat Islam adalah menegakkan kedaulata Republik Indonesia dan Agama Islam dengan senantiasa melaksanakan cita-cita Islam dalam urusan membangun kenegaraan.[9]

B. Visi dan Misi Politik Masyumi

Kemerdekaan yang diproklamirkan pada 17 Agustus 1945 oleh Ir. Soekarno dan Hatta membawa konsekuensi bagi rakyat Indonesia ketika memasuki masa revolusi (1945-1950). Tidak ada hambatan serius yang menghalangi hubungan politik antara arus utama pemimpin dan aktivis Islam politik dengan kelompok nasionalis. Perdebatan-perdebatan diantara mereka mengenai corak hubungan antara Islam dan negara dihentikan dan mereka bersedia mengenyampingkan, untuk sementara waktu, perbedaan-perbedaan ideologi. Tidak diragukan lagi, pada masa itu, para pendiri Republik Indonesia merasa bahwa mereka harus mengerahkan seluruh kemampuan untuk mempertahankan Negara Republik Indonesia yang baru berdiri dan mencegah Belanda yang ingin kembali ke wilayah Nusantara setelah kekalahan Jepang dan sekutu.

[9] *Ibid*, hal.12

Kelompok Islam dan nasionalis mampu mengembangkan hubungan politik yang relatif harmonis di antara mereka, walaupun terjadi benturan di sana-sini. Meskipun kelompok nasionalis tetap memegang kepemimpinan utama dalam pemerintahan, menyusul diserahkan kekuasaan oleh pihak Belanda kepada Republik Indonesia pada Desember 1949. Akan tetapi, kelompok Islam secara perlahan mulai memperlihatkan kekuatannya yang besar dalam perpolitikan nasional. Masyumi yang dibentuk pada Nopember 1945 sebagai wadah Islam politik, di mana satu-satunya partai politik Islam yang telah disatukan dari berbagai komponen kekuatan Islam, guna menjadi mediator politik mereka satu- satunya, hingga kelompok Islam berhasil menarik jumlah kekuatan yang begitu besar.[10] Dengan harapan jika pemilihan umum terselenggara pada sekitar tahun 1946, Masyumi yang saat itu tertata begitu kuat diperkirakan akan memperoleh kemenangan besar.

Visi dan misi Masyumi dalam Anggaran Dasarnya, yang disahkan oleh Kongres Umat Islam Indonesia (KUII) pada 1945, menyebutkan: Pertama, "menegakkan kedaulatan negara Republik Indonesia dan Agama Islam." Kedua, "melaksanakan cita-cita Islam dalam urusan kenegaraan."[11] Untuk memberikan gambaran lebih lanjut mengenai posisi Islam politik, perlu di sini dikutip apa yang ditulis oleh Mahendra sebagai berikut:

---

[10] Golongan Masyumi merupakan gabungan dari kelompok modernis dan tradisionalis, di mana kekuatan modernis seperti Muhammadiyah, dengan jumlah anggota yang besar di perkotaan, sementara golongan tradisionalis seperti NU, dengan jumlah anggota pendukung di tingkat pedesaan begitu besar, maka gabungan tersebut membuat Masyumi sebagai salah satu wadah Islam politik yang lebih kuat dibandingkan dengan kelompok nasionalis dan golongan lain

[11] Yuzril Ihza Mahendra, *Modernisme dan Fundamentalisme dalam politik islam.* Paramadina,1999, hal. 71.

Yang terpenting dalam rumusan dasar negara, bukanlah simbol-simbol distinktif seperti istilah "negara Islam" atau asas negara adalah Islam." Yang lebih penting bagaimana asas-asas doktrin yang berhubungan dengan kenegaraan dapat ditransformasikan ke dalam rumusan umum yang menggambarkan kehendak Islam, dengan mempertimbangkan kondisi zaman. Rumusan-rumusan umum itu diharapkan mampu menjiwai kehidupan bernegara, baik dari segi teoritis maupun praktiknya.[12]

Masyumi dalam melaksanakan cita-cita Islam tentang urusan negara, merasa keberatan untuk menerima Pancasila sebagai ideologi negara. Argumentasi mereka dapat dicermati dan pandangan yang disampaikan oleh Mohammad Natsir dalam Majelis Konstituante sebagai berikut:

Memang tak seorangpun yang menyangkal bahwa dalam Pancasila itu termasuk ide-ide yang baik. Tapi keterangan-keterangan yang kita dapatkan dari pendukung Pancasila sendiri, menunjukkan bahwa mereka itu sendiri tidak dapat menentukan apa isinya yang sebenarnya, apa urutan (volgorde-nya), apa asalnya, nucleus (intinya) dan hubungannya, interdependence-nya satu sama lainnya. Oleh karena itu tidak terang, maka kesulitan-kesulitan akan terus menjalar. Oleh karena asas negara kita itu harus terang dan tegas agar dapat membimbing bangsa kita, maka sulitlah bagi golongan kami untuk menerima sesuatu yang tidak jelas.[13]

Muhammad Natsir, mengatakan bahwa Pancasila merupakan suatu rumusan yang masih kosong dan oleh karena itu membutuhkan isi. Pancasila

---

[12] *Ibid.*, hal. 205.
[13] Natsir, *Islam sebagai Dasar Negara*, (Bandung: Bulan Sabit, 1970), hal. 26.

akan bermakna sesuai dengan yang memberi makna. Mengenai penganut agama lain, Islam tetap menghormati keberadaannya dan mereka dapat beribadah menurut agamanya. Dengan kata lain, agama tidak boleh dipaksa-paksakan kepada golongan lain.[14]

Masyumi sebagai sebuah mesin politik yang ingin merespon langsung keadaan revolusi yang sedang berjalan di Indonesia, sesuai dengan program perjuangan yang ditegaskan pada 17 Desember 1945, menyatakan bahwa perjuangan Masyumi bertujuan untuk "melenyapkan kolonialisme dan imperialisme" yang penuh dengan "kebuasan, kekejaman, dan kepalsuan."[15]

Golongan nasionalis "sekuler" melancarkan berbagai macam propaganda dalam menggoyahkan politik golongan Islam, "negara Islam" digambarkan sebagai negara yang tidak memiliki toleransi terhadap pemeluk agama lain. Kaum nasionalis "sekuler" juga aktif melancarkan propaganda bahwa hukum Islam adalah “hukum yang tidak mengenal perikemanusiaan”,[16] seperti peraturan-peraturan yang menjelaskan sekitar masalah '"hukum qisas." Juga dikemukakan tentang ketidakadilan dalam hukum perkawinan dan hukum warisan. Untuk itu, mereka mempropagandakan tentang kekejaman yang terdapat dalam Islam jika ideologi dijalankan diwilayah Indonesia sesuai dengan apa yang

[14] Anshari, *Piagam Jakarta 22 Juni 1945* ..., hal. 82
[15] Mahendra, *Modernisme dan Fundamentalisme*..., hal 72.
[16] *Ibid.*, hal. 76

diperjuangkan oleh kalangan Masyumi, Meskipun demikian, para saingan Masyumi dan kalangan yang berideologi nasionalis, bukanlah anti Islam.[17]

Menghadapi propaganda dan golongan pendukung Pancasila, Natsir menegaskan sebagai berikut, Saya ingin menyampaikan seruan yang sungguh-sungguh kepada saudara-saudara pendukung Pancasila. Sila-sila yang saudara maksud adalah terdapat di dalam Islam. Bukan sebagai "pure concepts" yang steril tetapi sebagai nilai-nilai hidup yang mempunyai substansi yang riil dan terang. Dengan menerima Islam sebagai dasar negara, saudara-saudara pembela Pancasila sedikitpun tidak dirugikan apa-apa. Baik sebagai pendukung Pancasila atau sebagai orang yang beragama. Malah akan memperoleh satu state philosophy yang hidup berjiwa, berisi, tegas, dan mengandung kekuatan. Tak ada satupun dari lima sila yang terumus dalam Pancasila itu yang akan terluput atau gugur, apabila saudara-saudara menerima Islam sebagai dasar negara. Dalam Islam terdapat kaidah yang telah pasti, di mana pure concepts dan sila yang lima itu mendapat substansi yang riil, mendapat jiwa dan roh penggerak.[18]

Pemojokan terhadap Masyumi dalam memperjuangkan ideologinya dihadapi dengan sangat hati-hati, sehingga tidak mengherankan kalau Masyumi sebagai partai modernis meninjau kembali bentuk perjuangan yang sedang dilakukan. Percaturan politik yang penuh persaingan dan tekanan mendorong Masyumi untuk merumuskan gagasan negara "berdasarkan Islam"

---

[17] Abu Muslim, "Poligami dan Poliandri: Kalau Orang Sakit Mau Jadi Dokter" *Aliran Islam*, (Bandung, Th, V No. 30. Nopember 1951). Lihat juga Mahendra, *Modernisme dan Fundamentalisme..*, hal. 74-78.

[18] Natsir, *Islam sebagai Dasar Negara...*, hal. 27.

dalam bentuk yang lebih longgar dan akomodatif, baik dengan tiga Undang-undang Dasar yang pernah diterapkan di Indonesia, maupun gagasan-gagasan dari Barat tentang kenegaraan. Dalam draf Konstituante Republik (Islam) Indonesia yang diusulkan Masyumi misalnya, bendera Indonesia adalah "merah putih," lagu kebangsaan Indonesia adalah "Indonesia Raya", dan lambang negara Indonesia adalah "Burung Garuda" yang bertuliskan "Bhinneka Tunggal Ika".[19] Dan fenomena yang demikian, nampak pada Masyumi kompromi yang sangat tinggi dalam merancang sikap politiknya, sehingga apa yang dikatakan oleh lawan politiknya tidaklah beralasan, yaitu bila golongan Masyumi berhasil maka golongan lain menjadi sengsara dan mendapat suatu kesusahan yang berarti. Di balik kenyataan yang dipropagandakan oleh para saingan politiknya, ternyata telah tercatat dalam sejarah bahwa keberadaan tokoh Islam telah memberikan kemajuan berarti pada Majelis Konstituante. Meskipun pembahasan tentang tujuh kata yang telah dihapuskan dari Piagam Jakarta membuat golongan Islam sangat kecewa, namun Masyumi telah memperjuangkan nilai substantif yang terdapat dalam Islam menjadi tersirat dalam Undang-undang Negara Republik Indonesia. Artinya, penolakan tujuh kata yang terdapat dalam Piagam Jakarta oleh Majelis Konstituante bukan berarti Islam politik telah mengalami kekalahan secara total.

[19] Mahendra, *Modernisme dan Fundamentalisme*..., hal. 77.

C. Pertumbuhan Partai Masyumi

1. Asas Partai Masyumi

Partai Masyumi berdasarkan pada Islam dan bertujuan terlaksananya ajaran dan hukum Islam dalam kehidupan masyarakat dan Negara Republik Indonesia. Asas merupakan landasan, titik tolak, tempat berpijak dan ruh bagi perjuangan. Partai Masyumi menjadikan Asas Islam sebagai asas perjuangan. Tafsir asas Masyumi terdapat dalam ayat Al-Qur'an (Surat Ali Imran ayat 112):

ضُرِبَتۡ عَلَيۡهِمُ ٱلذِّلَّةُ أَيۡنَ مَا ثُقِفُوٓاْ إِلَّا بِحَبۡلٖ مِّنَ ٱللَّهِ وَحَبۡلٖ مِّنَ ٱلنَّاسِ وَبَآءُو بِغَضَبٖ مِّنَ ٱللَّهِ وَضُرِبَتۡ عَلَيۡهِمُ ٱلۡمَسۡكَنَةُۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمۡ كَانُواْ يَكۡفُرُونَ بِـَٔايَٰتِ ٱللَّهِ وَيَقۡتُلُونَ ٱلۡأَنۢبِيَآءَ بِغَيۡرِ حَقّٖۚ ذَٰلِكَ بِمَا عَصَواْ وَّكَانُواْ يَعۡتَدُونَ ١١٢

Artinya: *"...Ditimpakan atas mereka kehinaan dimna saja mereka berada kecuali orang-orang yang tetap menjaga hubungannya dengan Allah dan hubungan dengan sesame manusia..."(Q.S Ali Imran: 112).*

Islam dalam ini sebagai asas partai Masyumi adalah ruh perjuangan. Partai Masyumi menawarkan gagasan-gagasan Islam ditengah sistem buatan manusia seperti komunisme, kapitalisme yang menghisap kaum buruh, sosialisme yang meniadakan kepemilikan pribadi, skularisme yang netral Agama (*Laadiniyah),* humanisme yang mengedepankan kemanusiaan. Partai Masyumi dengan sebuah pandangannya Indonesia ialah bukan sebagai medan peperangan golongan. Dengan menyikapi

Republik Indonesia terhadap keselamatan dan pembangunan negara Republik Indonesia.[20]

2. Ideologi Partai Masyumi

Tujuan yang menjadi bagian tidak terpisahkan dalam sejarah partai Masyumi tercantum pada anggaran dasarnya, yaitu untuk terlaksananya ajaran dan hukum Islam di dalam kehidupan perorangan, masyarakat, dan Negara RI menuju keridhaan Illahi. Ini dapat diartikan bahwa Masyumi bertujuan untuk menciptakan Indonesia yang bercorak Islam tetapi dengan memberikan kebebasan penuh pada golongan lain untuk berbuat dan memperjuangkan aspirasi politik sesuai dengan agama dan ideologinya masing – masing. Kelompok Islam maupun Nasionalis mempunyai sebuah Ideologi sebagai gagasan dari sebuah tujuan. Pada umumnya partai-partai Islam, seperti Masyumi, PSII, NU, Perti (*Persatuan Tarbiyah Islamiyah*) dan PPTI. Mempunyai Anggaran Dasar masing-masing dan mengambil sumber tujuan dan faham dari Al-Quran dan Sunnah serta ideologi Masyumi dalam Demokrasi, hukum dan keadilan merupakan suatu prinsip politik yang dijadikan pedoman di kalangan Islam dengan ideologinya prinsip bermusyawarah.[21]

Dalam kalangan Islam, musyawarah merupakan bagian dari S*yariah* yang harus ditegakkan. Prinsip bermusyawarah dalam kalangan Islam dihubungkan dengan demokrasi. Bermusyawarah dalam partai

[20] Artawijaya, *Belajar dari Partai Masyumi,* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014), p. 25-27.

[21] Daliar Noer, *Partai Islam di Pentas Nasional: Kisah dan Analisis Perkembangan Politik Indonesia*, cetakan ke-2 (Bandung: Mizan. 2000), p.460.

dicerminkan dalam rapat, konferensi, dan kongres. Bermusyawarah dalam konteks organisasi kenegaraan seperti Dewan Perwakilan Rakyat, Konstituante, Majelis Permusyawaratan Rakyat. Lembaga kepartaian pada umumnya dijadikan sebagai sarana untuk mengadakan bermusyawarah.[22] Perbedaan pandangan antara Nasionalis dan Masyumi. Masyumi mengkaitkan prinsip musyawarah dengan perkembangan demokrasi pada masa modern, iala suatu kebebasan manusia yang dijamin dengan hukum. Dan berfungsi sebagai pelembagaan sepereti DPR, Koinstituanten dan Mahkamah Agung. Sedangkan kaum Nasionalis, sesuai dengan hukum dan revolusi. Masyumi berpegang pada demokrasi, beberapa tokohnya seperti Mohammad Natsir, Boerhanudin Harahap dan Sjafruddin Prawiranegara, berjuang untuk menegakkan Demokrasi.[23]

D. Masyumi Pada Era Parlementer

Posisi politik Islam di bawah kekuatan Masyumi semakin kuat pada masa pascarevolusi (1945-1949). Secara historis, penyegaran partai politik dimulai pada 1950, atau baru pulih dari kelesuan pada tahun 1949. Dalam Parlemen yang baru dibentuk dengan jumlah anggota 236 orang, Masyumi tampil sebagai partai terbesar dengan menduduki 49 kursi. Namun demikian, banyaknya partai, organisasi, dan perwakilan dalam Parlemen (tidak kurang

[22] *Ibid*, hal.464-465
[23] *Ibid*, hal.467

dari 2 buah), bersama PSII, kelompok Islam hanya memperoleh 54 kursi (23%).[24]

Masyumi dalam beberapa kesempatan diminta untuk membentuk dan memimpin kabinet, dari tujuh kabinet di bawah Sistem Demokrasi Konstitusional (1950-1957),tiga diantaranya dipercayakan kepemimpinannya kepada Masyumi.[25] Selain itu, ketika Partai Nasional Indonesia (PNI) diberi mandat untuk membentuk pemerintahan, Masyumi dan NU merupakan pasangankoalisi utama.[26]

Hasil pemilihan umum pertama yang diselenggarakan pada September 1955 menunjukkan bahwa kelompok Islam yang terdiri dari Masyumi, NU, PSII, dan Perti, hanya menduduki 114 kursi dari 257 kursi yang tersedia di Parlemen. Ini berarti bahwa hanya 43,5% suara yang dimiliki oleh golongan Islam; Dengan demikian, golongan Islam tidak dapat menguasai Parlemen secara mayoritas, meskipun masyarakat Indonesia adalah mayoritas Islam.

Kenyataan ini ditambah dengan kontroversi ideologis yang terbuka, sehingga menciptakan suatu hubungan yang kurang harmonis antara pendukung Islam dengan nasionalis pada tahun-tahun pertama masa pasca revolusi (1950-1953). Kritik terhadap Pancasila oleh pemikir dan aktivis politik Islam memang jarang terjadi. Meskipun Muhammad Natsir mengatakan bahwa karena dimasukkan prinsip "Percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa" ke dalam Pancasila, berarti Indonesia sama sekali tidak

[24] Effendy, *Islam dan Negara...*, hal. 94.

[25] Kabinet Natsir (1950-1951): Kabinet Dr. Soekiman Wirjosandjojo (1951-1952); dan Kabinet Burhanuddin Harahap (1955-1956).

[26] Effendy, *Islam dan Negara...*, hal. 94.

menyingkirkan agama dari masalah-masalah kenegaraan. Namun, perbedaan pandangan hidup antara tokoh Islam dan tokoh nasionalis lainnya memang telah terjadi sebelum kemerdekaan. Islam tidak dapat dipisahkan dari politik. Inilah isu sentral dalam polemik panjang antara Natsir dan Soekamo yang telah mengental. Natsir kembali mengatakan bahwa:

Islam adalah satu falsafah hidup, satu evens filosofie, atau satu ideologi, satu sistem peri kehidupan, di samping ideologi dan isme-isme lainnya. Ideologi ini menjadi pedoman bagi kita sebagai Muslim, dan buat itu kita tidak dapat melepaskan dari politik. Dan sebagai seorang berpolitik, tidak melepaskan diri dari ideologi kita, yakni ideologi Islam. Bagi kita menegakkan Islam itu tak dapat lepas dari menegakkan negara, menegakkan kemerdekaan.[27]

Keadaan Masyumi pada masa kemerdekaan mencerminkan watak sosialis. Namun, bersama dengan itu, ia dipojokkan oleh golongan Komunis, yang secara karikaturis menjadikannya sebagai golongan borjuis-kapitalis. Di samping itu, Masyumi ditakuti oleh golongan menengah dan atas karena radikalisme agama dan sosialnya, dan dicurigai golongan bawah karena pengandalan konsenvatisme sosial dan reaksionernya. Dengan kata lain, keteguhan Masyumi dalam memperjuangkan dasar negara Islam itulah yang oleh lawan-lawan politiknya dijadikan "cambuk" untuk melemahkan Masyumi.

[27] Natsir, *Islam sebagai Ideologi*, (Jakarta: Penjiaran Ilmu. t.t), hal. 7. Bandingkan pula dengan pendapat Subagio 1. N., dalam Panitia Peringatan 70 Tahun Wilopo, Wilopo 70, (Jakarta. Gunung Agung, 1979), hal. 163.

Golongan Islam hanya mengantongi 45-5% dari kursi Parlemen dalam Pemilihan Umum 1955, dan ini membuat mereka menjadi sulit untuk menggolkan gagasan Islam sebagai dasar negara. Namun demikian, secara keagamaan mereka tergerak oleh kewajiban transedental untuk menghadirkan watak holistik Islam ke dalam realitas. Meskipun secara politis ia tidak berhasil memperjuangkan Islam sebagai ideologi negara, Masyumi tetap menunjukkan bahwa ia bukan partai politik yang cenderung mengingkari janji, seperti yang diberikan dalam kampanye. Para politisinya senantisa mendesak Parlemen untuk menerima Islam sebagai dasar negara atau kembali kepada Piagam Jakarta.[28] Sikap konsisten Masyumi inilah yang menjadikannya sebagai sebuah partai politik yang diperhitungkan. Bahkan, setelah dibubarkan oleh pemerintah Demokrasi Terpimpin, Masyumi masih diperhitungkan. Hal ini akan diuraikan dalam bab selanjutnya.

Periode 1950 hingga 1959 dikenal dengan dekade Demokrasi Konstitusional, yaitu Indonesia beroperasi di bavvah UUD 1950. Terlepas dari kenyataan bahwa Indonesia mengalami beberapa kali perubahan konstitusi, UUD 1950 masih dianggap sebagai sebuah UUDS.[29] Bagi golongan Islam, harapan untuk memasukkan ideologi Islam hanya ketika perumusan Undang-undang Dasar yang permanen. Poin-poin ke-islaman dalam Piagam Jakarta akan dapat dipertegas dalam Undang-undang

[28] Noer, *Partai Islam...*, hal. 266-267.

[29] Sejak 1945 hingga sekitar 1959, Indonesia mengalami tiga bentuk kerangka konstitusi dan model negara yang berbeda. Dari 1945-1949, Indonesia adalah sebuah negara yang berbentuk kesatuan nasional di bawah UUD 1945. Menyusul pemindahan kedaulatan dari Belanda pada 1949, Indonesia menjadi bentuk federal dengan nama Republik Indonesia Serikat (RIS) di bawah Undang-undang Dasar tahun 1949. Pada tahun 1950 Indonesia kembali kepada bentuk negara kesatuan Nasional dengan menggunakan Undang-undang Dasar tahun 1950. Lihat Feith, *The Decline of Constitutional...*, hal. 1-99; Kahin, *Nationalism and Revolution...*, hal. 4.46-469.

pendukung nantinya Kenyataan Inilah yang telah membuat Islam politik untuk melakukan koalisi dengan golongan lain, sehingga gagasan Islam politik dapat menjadi kenyataan.

Pemilihan Umum Pertama, rencaranya diselenggarakan segera setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, yakni pada 1946. Namun, pada kenyataanya, pemilihan umum ini terlaksana pada 1955. Penundaan pemilihan umum ini diantaranya disebabkan oleh kekhawatiran kelompok nasionalis yang saat itu sedang berkuasa. Mereka memperkirakan jika Islam politik yang diwakili oleh Masyumi akan memenangkan pemilu. Mereka menduga bahwa jika Masyumi menang maka ia akan berusaha dengan keras untuk mewujudkan negara berdasarkan Islam.[30]

Fenomena politik saat itu telah membuat golongan nasionalis berupaya agar dalam waktu senggang sebelum pemilihan umum dilaksanakan, perkembangan masyarakat dapat ditata, agar tidak terlalu condong kepada aliran politik yang dibawa oleh golongan Islam. Hal ini terlihat dari isi pidato Soekarno dalam kunjungannya ke Amuntai pada 27 Januan 1953. Soekarno memperingatkan akan pentingnya mempertahankan Indonesia sebagai negara kesatuan.

Negara yang kita inginkan, katanya "adalah sebuah negara nasional yang mencakup seluruh Indonesia. Jika kita mendirikan negara dengan mendasarkan kepada Islam, beberapa wilayah yang penduduknya bukan Islam, maka akan memisahkan diri dari kesatuan Indonesia, seperti Maluku,

[30] Effendy, *Islam dan Negara*..., hal 102.

Bali, Flores, Timor, Kepulauan Kai, dan Sulawesi, dan Irian Barat yang belum menjadi wilayah kita, akan tidak mau untuk menggabungkan diri dengan kita".[31]

Pernyataan Soekarno selaku Presiden pada saat itu, sekaligus merupakan seorang tokoh PNI (Partai Nasional Indonesia), dapat dikatakan sebagai suatu bentuk penetrasi sikap nasionalis kepada masyarakat Amuntai. Golongan Islam masih berharap agar dapat kembali kepada Piagam Jakarta, yang masih memiliki unsur ke-islamannya. Oleh karenanya, suatu hal yang wajar jika golongan ini memandang bahwa peristiwa Amuntai sangat tidak demokratis dan tidak konstitusional, serta mereka memandang Soekarno telah menyebarkan bibit-bibit separatisme.[32] Sementara golongan Nasionalis mendukung apa yang menjadi topik kasus Amuntai. Mereka mengatakan apa yang diucapkan Soekarno dalam pidatonya di Amuntai merupakan hak prerogatifnya selaku pemimpin revolusi.

Perseteruan dua kubu politik dimaksud telah merusak konsensus sebelumnya, terutama tentang diterimanya Pancasila sebagai suatu landasan ideologi politik bangsa. Perseteruan ini telah menghidupkan kembali konflik ideologis politis lama antara kelompok Islam dengan kelompok nasionalis mengenai corak hubungan politik antara Islam dan nasionalis yang memang telah pernah meruncing antara Soekarno dan para tokoh Islam yang dimotori oleh Natsir.

---

[31] *Ibid*., hal. 102.

[32] Herbert Feith, *Dynamics of Guided Democracy*, Ruth McVey (ed.). Indonesia, New Have: Southeast Asia Studies, Yale University, by Arragement With. Human Relations Area Files Press, 1963), hal. 317.

Majelis telah menyelesaikan sebagian besar dimotori tugasnya dalam rentang waktu Nopember 1956 - Juni 1959.[33] Namun, perdebatan tentang dasar negara tidak dapat berjalan seperti pembicaraan lain dalam Konstituante, sehingga terjadi deadlock. Dalam perdebatan tentang dasar negara, muncul tiga aliran utama, yaitu Islam, Pancasila, dan Sosial Ekonomi. Akan tetapi, mengingat perdebatan-perdebatan tentang dasar negara yang berlangsung sebelumnya, pertentangan yang tajam terjadi antara pendukung Islam dan Pancasila.

Rumusan resmi program politik Masyumi seperti yang diungkapkan dalam tulisan Mahendra, adalah terwujudnya Indonesia sebagai sebuah "negara hukum" yang berdasarkan ajaran-ajaran Islam.[34] Rancangan Undang-undang Republik (Islam) Indonesia yang diusulkan Masyumi, merumuskan dua alternatif asas negara, yaitu suatu negara republik yang berdasarkan Islam atau negara republik berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa. Namun, sebagai acuan bagi wakil-wakil Masyumi yang duduk di Konstituante untuk menyusun Undang- undang Dasar negara, Menurut tokoh Masyumi belumlah rancangan tersebut menjadi "harga mati". Rancangan itu menjadi suatu harga tawar yang maksimum dari kalangan Masyumi di Majelis Konstituante sebagai "penyalur aspirasi golongan Islam".[35] Undang-undang Dasar yang ada pada saat itu merupakan Undang-undang Dasar 1950, yang telah melampaui garis tengah dari sebuah negara yang diinginkan oleh golongan

[33] Yang telah dirumuskan dalam masa hampir dua setengah tahun itu antara lain masalah hak-hak asasi manusia, prinsip-prinsip kebijakan negara, dan bentuk pemerintahan sebagai unsur substantif dan konstitusi. Lihat Effendy, *Islam dan Negara*..., hal. 106.

[34] Mahendra, *Modernisme dan Fundamentalisme*..., hal. 204-222.

[35] Noer, Partai Islam..., hal, 266-267.

Islam. Dengan demikian, mereka melihat bahwa perjuangan Masyumi dalam Majelis Konstituante merupakan upaya maksimum.[36]

Perjuangan yang alot memang harus dilakukan oleh golongan Islam dalam memenangkan ideologi Islam di Majelis Konstituante. Kelompok Islam pada dasarnya menginginkan untuk kembali kepada Piagam Jakarta dengan mengusulkan agar Islam dijadikan sebagai ideologi negara berdasarkan argumen-argumen berikut: (1) watak holistik Islam, (2) keunggulan Islam atas semua ideologi dunia, dan (3) pada kenyataannya bahwa mayoritas dari penduduk Indonesia beragama Islam.[37] Namun, populasi Parlemen lebih dari 50% dikuasai oleh anggota yang berideologi nasionalis, di mana mereka memperjuangkan Pancasila sebagai dasar negara. Ini tentu sangat berpengaruh terhadap hasil perjuangan kelompok Islam.

Meskipun golongan Islam, yang diwakili oleh Masyumi, tidak nienguasai mayoritas Parlemen, mereka tetap berusaha dengan sungguh-sungguh untuk memperjuangkan target maksimumnya yaitu Islam sebagai ideologi negara. Pada dasarnya, mereka bukan tidak menerima Pancasila tetapi mereka ingin terlebih dahulu mendengar pendapat golongan lain yang mendukung Pancasila. Masyumi juga ingin membentangkan argumennya tentang keunggulan Islam sebagai dasar negara.

Muhammad Natsir mengatakan, sikap kompromistis harus dilandasi pada kejujuran dan keterbukaan. Mereka terlebih dahulu harus membentangkan pendirian mereka masing-masing dan dengan cara demikian,

[36] Mahendra, *Modernisme dan Fundamentalisme*..., hal. 206.
[37] Effendy, *Islam dan Negara*..., hal. 107.

masing-masing pihak bisa mencari titik-titik persamaan untuk dijadikan dasar kompromi tersebut.[38]

Seperti telah dipaparkan sebelumnya, tokoh-tokoh Masyumi merasa penafsiran terhadap Pancasila yang dikemukakan oleh pendukung-pendukungnya nampak beranekaragam. Wongsonegoro, seorang tokoh mistik Jawa dari Partai Indonesia Raya (PIR), menafsirkan sila pertama Pancasila tentang Ketuhanan dari sudut pandang pantheisme, dimana golongan Masyumi sulit untuk menerimanya. Tokoh-tokoh Partai Komunis Indonesia (PKI) seperti Aidit, Njoto dan Sakirman menafsirkan Ketuhanan di dalam Pancasila sebagai "kebebasan beragama". PKI dalam ideologi mereka menganut faham Marxisme-Leninisme. Lebih jauh dalam menafsirkan tentang kebebasan beragama, mereka menekankan maksud bebas untuk tidak beragama, dan bahkan, bebas untuk melakukan kebebasan anti agama. Dengan kata lain, bagi PKI, agama merupakan suatu hal yang bersifat pribadi, dengan demikian negara tidak bisa memaksa rakyat agar menganut suatu agama.[39]

PNI dengan pendukung yang heterogen, menafsirkan Pancasila dengan lebih beragam diantaranya ada yang mengedepankan Kristen, dan juga bentuk sekuler[40] Masyumi mengkritik dengan tajam Pancasila sebagai dasar negara, bahkan pendapat Soekarno sendiri yang menafsirkan Pancasila

[38] Mahendra, *Modernisme dan Fundamentalisme*..., hal. 208

[39] Natsir, *Islam sebagai Dasar Negara...,* hal. 13-25.

[40] Roeslan Abdulgani, unsur sekuler, dan Arnold Manonutu sebagai tokoh Kristen dalam PNI. Lihat *Tentang Dasar Negara di Majelis Konstituante,* Jilid I dan II, (Bandung: Masa Baru, 1957), hal. 89-90, 341-345; Maarif, *Islam dan Masalah Kenegaraan...,* hal. 146-152; Mahendra, Modernisme dan Fundamentalisme.

dari Pancasila yang diperas menjadi "trisila" dengan maksud dan tafsirnya adalah sosio-nasionalisme, sosio-demokrasi dan sosio-Ekonomi," kemudian diperkecil hingga menjadi "eka sila."[41] Masyumi menanggapi apa yang ditafsirkan oleh Soekarno, bahwa bagaimana mungkin Ketuhanan yang diyakini oleh orang-orang beragama sebagai masalah fundamental dalam hidupnya dapat dilenyapkan karena "diperas" hingga menjadi gotong royong, sementara gotong royong itu tidak lebih dari etika sosial.[42]

Majelis Konstituante telah menyelesaikan 90% tugasnya pada akhir 1958. kata Mr. Wilopo sebagai ketua Majelis Konstituante dalam pidato penutupan sidang pada 18 Pebruari 1959.[43] Ini berarti, Majelis Konstituante masih memiliki waktu 10 bulan lagi untuk merampungkan tugasnya. Akan tetapi, 10% sisa tugasnya, yakni tentang ideologi negara tidak dapat diselesaikan lagi karena terjadi perdebatan yang alot dan berkepanjangan dalam Majelis Konstituante.

Djuanda sebagai Perdana Menteri dan Soekarno sebagai Presiden pada saat itu menginginkan untuk diberlakukan kembali UUD 1945,[44] sebuah keputusan yang mendapat dukungan penuh dari militer. Dalam Parlemen, debat yang alot juga terjadi dalam pembicaraan tentang diberlakukan kembali UUD 1945. Setelah dipandang Majelis Konstituante tidak lagi dapat menjalankan sikap kompromi antar pendukung politik yang ada dalam Majelis, maka diperlukan voting. Sebelum pemungutan suara dilangsungkan,

---

[41] Soekarno, *Lahirnya Pancasila,* (Bandung: Dua R. t.t.), hal. 22-23.
[42] Mahendra, *Modernisme dan Fundamentalisme...,* hal. 210.
[43] *Ibid.*, hal. 213.
[44] *Kembali ke Undang-undang Dasar 1945,* (Jakarta, Kementrian Penerangan, 1959), hal. 29.

K. H. A. Wahab Chasbullah, pemimpin utama NU, menyatakan bila usul amandemen Masjkur diterima, maka pihak Islam akan menerima Undang-undang Dasar 1945 dan bila usul tersebut ditolak, maka pihak Islam tidak akan menerima untuk kembali kepada (Undang-undang Dasar 1945. Sejumlah 466 anggota yang hadir dari 470 anggota Majelis, 201 suara mendukung usul Masjkur dan 265 menolak.[45]

Pemungutan suara terjadi tiga kali, yakni pada 30 Mei, 1 Juni, dan 2 Juni 1959, dengan hasil berturut-turut sebagai berikut: 269 setuju dan 199 menolak, 264 setuju dan 204 menolak, dan 263 setuju dan 204 menolak.[46] Kebanyakan anggota fraksi yang bukan dari golongan Islam tidak bersedia hadir. Menurut ketentuan Majelis, keputusan yang prinsipil memerlukan dua pertiga mayoritas suara para anggota yang hadir. Hasil voting dalam Majelis menunjukkan bahwa tidak ada golongan yang dinyatakan menang. Majelis Konstituante menghadapi jalan buntu, berdasarkan hasil tiga kali pemungutan suara tersebut. Kemandekan dalam Majelis Konstituante yang berlangsung hingga 2 Juli 1959 mendorong Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden[47] dengan persetujuan Kabinet 5 Juli 1959. Dengan demikian, terbubarlah Majelis Konstituante.[48]

Selain itu, faktor yang mendorong pemerintah mengeluarkan Dekrit adalah, situasi politik Indonesia yang semakin tidak stabil. Di bidang politik,

---

[45] Yamin, *Naskah Persiapan...*, hal. 569-573.

[46] *Ibid.*, hal. 618.

[47] Isi Dekrit dapat dilihat dalam *Ibid.,* hal. 110-112; Maarif, *Islam dan Masalah Kenegaraan...*, hal. 177-178.

[48] Abdul Azis Thaba, *Islam dalam Negara:* dalam Politik Orde Baru, (Jakarta. Gema Insaai Press, 1996), hal. 168.Yusril Ihza Mahendra, *"Prolog PRRI dan Keterlibatan Sjarifuddin - Natsir",* dalam Endang

pemerintahan pusat pada saat itu harus menghadapi pemberontak PRRI di Sumatera, dan Permesta di Sulawesi. Dua kelompok ini menuduh bahwa pemerintah pusat bersikap "'Jawa Sentris" dan bersikap lunak terhadap PKI, sehingga telah memicu kemelut dalam negeri yang membuat golongan Islam semakin merasa perlu berjuang untuk suatu ideologi yang mereka inginkan.[49]

Majelis Konstituante bubar, maka sistem demokrasipun berubah menjadi Demokrasi Terpimpin dengan sistem Nasakom (Nasional Agama Komunis), di mana kepemimpinan akan dapat dikontrol oleh satu orang, yaitu Presiden. Dengan demikian, terbentuk suatu pola yang mengarah kepada sistem "diktator". Bagi PNI dan PKI adalah wajar bila mereka sangat mendukung diberlakukannya demokrasi terpimpin. Hal ini dapat menciptakan suatu koalisi yang lebih besar bagi mereka dalam pemerintahan. Di pihak militer, dengan diberlakukannya UUD 1945 dan pola Demokrasi Terpimpin, maka mereka dapat ambil bagian dalam politik secara aktif, dan dapat menduduki posisi administrasi dalam pemerintahan.[50]

Pemusatan kekuasaan di satu tangan menimbulkan konsekuensi yang berbeda-beda pula bagi partai politik Islam.[51] Partai Islam NU, PSII dan Perti bergabung untuk mendukung Demokrasi Terpimpin. Mereka tampil sebagai kelompok agama pada masa Nasional Agama Komunis (Nasakom). Sedangkan Masyumi yang selama ini memberikan kritik yang tajam terhadap pemerintah, terancam kedudukannya. Menurut Soekarno, mereka telah

---

[49] Yusril Ihza Mahendra, *"Prolog PRRI dan Keterlibatan Sjarifuddin - Natsir",* dalam Endang Saifuddin Anshary (ed.), Pak Natsir 80 Tahun, (Jakarta. LP3ES, 1988), hal. 52-54.

[50] Wiliam H. Frederick dan Soeni Soeroso (ed.), *Pemahaman Sejarah Indonesia Sebelum dan Sesudah Revolusi,* (Jakarta: LP3ES, 1991), hal. 381-381.

[51] Maarif, *Islam dan Masalah Kenegaraan...,* hal. 84-185

memposisikan diri sebagai penghalang revolusi sehingga tidak dibiarkan eksis dan harus dibungkam demi kelancaran Demokrasi Terpimpin.[52]

Masyumi sering mendapatkan perlakuan yang kurang wajar dari pemerintah, pertama kali pada 20 Maret 1960 dimana ia dikucilkan dari DPRGR. Anggota DPRGR dipilih dan ditunjuk sendiri oleh Soekarno, dengan tidak mengikutsertakan anggota dari Masyumi dan PSL Hal ini merupakan kemunduran bagi parpol Islam. Jika dalam Majelis Konstituante mereka diwakili oleh 115 orang maka dalam DPRGR turun secara drastis menjadi 43 orang (NU 36 orang, PSII 5 orang dan Perti 2 orang). Jika ditambah anggota golongan dan lain-lain sebanyak 24 orang jumlahnya menjadi 67 orang. Sementara itu wakil nasionalis sekuler 94 orang dan komunis 81 orang dengan jumlah semua 283 orang.[53] Setelah Parlemen yang ditunjuk oleh Bung Karno berjalan selama empat bulan, partai Masyumipun dibubarkan oleh Presiden Soekarno. Pembubaran Masyumi oleh pemerintah, diantaranya, disebabkan keterlibatannya dalam Pemerintah Revolusi Republik Indonesia (PRRI) dan Perjuangan Semesta Alam (Permesta). Abdul Azis Thaba, dengan mengutip disertasi dari Maarif, mengatakan bahwa "berdasarkan fakta otentik, tidak ada bukti keterlibatan Masyumi dalam pemberontakan daerah, tetapi bagi Soekarno yang terpenting adalah "Si kepala batu" Masyumi harus dienyahkan guna melicinkan jalannya revolusi.[54] Menurut dokumen politik, tidak ada indikasi keterlibatan Masyumi dalam

[52] Abdul Azis Thaba, *Islam dalam Negara:* dalam Politik Orde Baru, (Jakarta. Gema Insaai Press, 1996), hal. 178.

[53] *Ibid.*, hal. 178.

[54] *Ibid*., hal. 179.

PRRI. Yang terlibat adalah tokoh-tokoh Masyumi secara pribadi, yattu Mohammad Natsir, Syarifuddin Prawiranegara, dan Boerhanuddin Harahap. Peran merekapun pada dasarnya lebih banyak bergerak sebagai pemberi landasan teoritis saja dalam perjuangan penegakan pemerintahan pusat.[55]

Demi untuk melancarkan apa yang telah diprogramkan dalam Demokrasi Terpimpin, maka setiap hal atau golongan yang dipandang dapat mengganggu jalannya politik mereka harus dibungkam. Para tokoh Masyumipun akhirnya ditangkap karena dipandang selalu mengganggu Demokrasi Terpimpin. Tokoh-tokoh yang ditangkap antara lain Mohammad Roem, Prawoto Mangkusasmito, Isa Ansany, Yunari Nasution, Mohammad Natsir, Syarifuddin Prawiranegara, Burhanuddin Harahap, Kasman Singodimejo, dan Yusuf Wibisono. Bersama mereka ikut ditahan juga Hamka. Assaat dan K. H. E. Z. Muttaqien.[56]

Pembubaran Masyumi telah menjadikan NU sebagai salah satu partai Islam yang ada dalam parlemen hingga Orde Baru muncul, meskipun pengaruhnya sangat kecil dalam pengambilan kebijakan secara nasional. Salah satu ide dari Demokrasi Terpimpin adalah melakukan emaskulasi partai-partai politik. Menurut Soekarno partai-partai politik inilah yang membuat pemerintah tidak efektif sehingga dia mengurangi jumlah partai politik dari 24 parpol menjadi 10 parpol.[57] Kolaborasi NU-Soekarno berlangsung hingga runtuhnya sistem Demokrasi Terpimpin yang

[55] B. J. Bolan, *Pergumulan Islam di Indonesia 1945-1970*, (Jakarta: Grafiti), hal. 103. Lihat Maarif, *Islam dan Masalah Kenegaraan...*, hal. 187-192.

[56] *Ibid*., hal. 179.

[57] *Ibid.*, hal. 182-183.

ditumbangkan oleh suatu kudeta yang gagal oleh Gerakan 30 September yang disponsori oleh Partai Komunis Indonesia pada tahun 1965. Berpegang pada selembar Surat Perintah 11 Maret 1966 (Supersemar), Jendral Soeharto sebagai pemegang mandat mengambil langkah dalam menyelamatkan negara. Terhitung sejak 11 Maret 1966, maka dibangunlah suatu bentuk potitik baru yang oleh pendukungnya disebut "Orde Baru".[58]

Keberadaan Masyumi yang terdiri dari berbagai unsur, membuat Masyumi sangat menyatu dengan rakyat sampai ke pelosok nusantara, sehingga harus diperhitungkan oleh lawan-lawan politiknya. Dengan mengemban aspirasi rakyat dalam memperjuangkan misinya yang berdasarkan Islam di Parlemen untuk mewujudkan Islam sebagai ideologi negara. Artinya, Parlemen paling kurang menerima Piagam Jakarta sebagai ideologi negara. Hal inilah yang membuat Masyumi menjadi besar dimata rakyat, tetapi Masyumi gagal mewujudkan keinginan rakyat (pendukungnya) dalam Majelis Konstituante, sehingga Masyumi terpaksa menerima Pancasila sebagai ideologi negara.

Masyumi didirikan sebagai sebuah wadah Islam politik, pendirian Partai Masyumi adalah penyatuan dari organisasi keagamaan yang beraliran Islam, dan terdiri dari berbagai kalangan, baik yang berbentuk tradisional maupun terpelajar, sehingga kesatuan yang terdiri dari berbagai lapisan masyarakat harus diperhitungkan oleh lawan-lawan politiknya. Oleh karena

[58] Thaba, *Islam dan Negara...*, hal. 181-183.

itu, kolaborasi dari berbagai kalangan dalam Masyumi telah melahirkan visi perjuangan Masyumi berbentuk Islam.

Perjuangan partai Masyumi dengan visi keislaman, telah membuatnya sebagai salah satu simbul Islam politik dalam Parlemen, dan melahirkan suatu perdebatan yang alot antara kubu Masyumi dengan lawan politiknya dalam membahas ideologi negara di Parlemen. Hal tersebut menjadi salah satu sebab dibubarnya Majelis Konstituante dengan keluarnya Dekrit Presiden pada tanggal 5 Juli 1959, dan dinyatakan kembali ke Undang-undang Dasar 1945. Dengan demikian, berakhirlah perdebatan antara kubu Islam politik dengan kubu nasionalis, yang sama-sama menginginkan bentuk negara sesuai dengan ide mereka.

BAB III

RIWAYAT HIDUP K.H. ABDUL KYAI WAHID HASYIM

A. Asal-usul K.H. Abdul Wahid Hasyim

K.H. Abdul Wahid Hasyim adalah putra Ulama besar yakni Kyai Hasyim Asy'ari. K.H. Abdul Wahid Hasyim terlahir dengan nama lengkap Abdul Wahid Hasyim. Kyai Wahid Hasyim lahir pada hari Jumat Legi tanggal 5 Rabi'ul Awal 1333 H, bertepatan dengan 1 Juni 1914 M. Kyai Wahid Hasyim merupakan anak kelima dari sepuluh bersaudara Ayahnya adalah seorang Ulama besar pendiri Organisasi Nahdalatul Ulama. Ibunya bernama Nyai Nafiqah Binti Kyai Ilyas. Awalnya ayahnya memberi nama Muhammad Asy'ari tetapi akhirnya dinamai Abdul Wahid yang dimbil dari nama Kakeknya. Akan tetapi ketika dewasa, Kyai Wahid Hasyim lebih suka menulis namanya dengan menambahkan nama ayahnya dibelakang namanya sendiri sehingga menjadi Abdul Wahid Hasyim. Ibunya sendiri memanggilnya dengan sebutan Mudin kepada Kyai Wahid Hasyim dan beberapa keponakannya memanggilnya dengan sebutan Pak It.[1]

Sewaktu mengandung Kyai Wahid Hasyim, kondisi kesehatan Nyai Nafiqoh agak memburuk. Dengan adanya keadaan seperti itu merupakan sudah menjadi kebiasaan bagi Nyai Nafiqoh jika sedang mengandung kesehatannya memburuk. Oleh karena itu suatu hari Nyai Nafiqoh bernazar" Jika nanti bayi yang kukandung lahir selamat, akan kubawa kepada guru

[1] Nur Rokhim, Kiyai-Kiyai Kharismatik & Fenomenal (Yogyakarta: IRCiSoD, 2015), hal. 229-230

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ayahnya yaitu K.H. Kholil Madura.[2] Kelahiran Kyai Wahid Hasyim pada saat itu bertepatan dengan pengajian yang sedang dilaksanakan di rumahnya. Kelahiran Kyai Wahid Hasyim sangat disambut dengan bahagia oleh keluarga dan kedua orang tuanya karena sebelumnya Kyai Hasyim Asy'ari belum dikaruniai anak laki-laki. Kyai Hasyim Asy'ari dengan bahagianya beliau langsung memberikan nama untuk bayi laki-lakinya yaitu Muhammad Asy'ari. Seiring berjalannya waktu dikarenakan sering sakit-sakitan kemudian Kyai Hasyim Asy'ari menggantikan namanya dengan Abdul Kyai Wahid Hasyim yang diambil dari nama Kakeknya.[3] Kyai Wahid Hasyim ketika berusia 3 bulan, Nyai Nafiqoh teringat akan nazarnya ketika mengandung jabang bayinya. Kemudian Nyai Nafiqoh pergi ke Madura untuk melepaskan Nadzarnya kepada K.H. Kholil Bangkalan. Perjalanannya antara Tebuireng dan Bangkalan ditempuh dengan menggunakan Kereta Api, kemudian ketika sudah sampai di Madura Nyai Nafiqoh menaiki kendaraan Dokar untuk menuju ke Pesantren K.H. Kholil Bangkalan. Nyai Nafiqoh ditemani oleh Mbah Abu.[4] Setalah itu perjalanan dilanjutkan dengan berjalan kaki menuju ke Pesantren K. H. Kholil Bangkalan. Setelah sesampainya di dalam dan ketika sudah menunggu lama di depan kediamannya K.H. Kholil Bangkalan, namun pemilik rumah tidak mengijinkan tamu masuk walupun cuaca diluar hujan.

---

[2] Mohammad Rifai, Wachid Hasyim: Biografi singkat 19141953.(Jogjakarta:Garasi, 2009), hal. 18

[3] Tempo, Seri Tokoh Tempo: Wachid Hasyim (Tokoh Islam DIawal Kemerdekaan), (Jakarta: KPG (Kepustakaan Populer GramedIa, 2011), hal.11.

[4] Aboebakar Atjeh, *Sejarah hidup K.H. Abdul Wahid Hasyim*, cet. Ke-1 (Jombang: Pustaka Tebuireng, 2015), hal..158.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kyai Wahid Hasyim mendapatkan pendidikan dari ayahnya, yaitu Kyai Hasyim Asyari pengasuh Pondok Pesantren Tebuireng. Ketika memasuki dewasa Kyai Wahid Hasyim mulai mencari pendidikan diluar dari pesantren Tebuireng, berpindah-pindah Pondok Pesantren karena menurut Kyai Wahid Hasyim, disetiap Pondok Pesantren mempunyai spesialis masing-masing dalam memberikan pembelajaran, seperti: Ilmu fikih, tafsir, falaq, manteq, dan hukum agama.[5] Sepulang dari Makkah, Kyai Wahid Hasyim menikahi putri K.H. Bisri Syansuri, pendiri Pesantren Denayar Jombang.[6] Pertemuan Kyai Wahid Hasyim dengan Nyai Sholehah putri dari K.H. Bisri Syansuri pada acara pesta pernikahan di Jombang Jawa Timur. Kemudian Kyai Wahid Hasyim menemui K.H. Bisri Syansuri untuk melamar Nyai Sholehah. Ketika usia Nyai Sholehah pada saat menikah dengan Kyai Wahid Hasyim itu belum genap 16 tahun, Kyai Bisri menerima lamaran Kyai Wahid Hasyim. Menurut Lily Wahid, anak kelima dari Kyai Wahid Hasyim-Nyai Sholehah, ketika menikah Nyai Sholehah telah berstatus Janda. Kitika pada usia 15 tahun ia dijodohkan oleh ayahnya dengan seorang pemuda bernama Abdurrohim, anak Kyai Cholil pemilik Pondok Pesantren Bungkung, Singosari-Malang.[7]

Pernikahan Kyai Wahid Hasyim dan Nyai Sholehah diselenggarakan di Denanyar, Jombang, pada Jumat, tanggal 10 Syawal 1356 H/1938 M.

[5]Tempo, Seri Tokoh Tempo: Wachid Hasyim (Tokoh Islam DIawal Kemerdekaan), (Jakarta: KPG (Kepustakaan Populer GramedIa, 2011), hal. 21

[6] Nur Rokhim, *Kiyai-Kiyai Kharismatik & Fenomenal* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2015), hal. 231

[7] Tempo, Seri Tokoh Tempo: Wachid Hasyim (Tokoh Islam DIawal Kemerdekaan), (Jakarta: KPG (Kepustakaan Populer GramedIa, 2011), hal.26

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Setelah menikah, Kyai Wahid dan Nyai Sholehah tinggal di Denanyar selama sepuluh hari. Kemudian pindah ke Tebuireng dan menetap hingga 1942.[8] Kyai Wahid Hasyim aktif dalam berorganisasi saat berumur 20 tahun. Kyai Wahid Hasyim aktif di Nahdlatul Ulama. Meski anak seorang pendiri Nahdlatul Ulama tetapi Kyai Wahid Hasyim tetap memulai karirnya dari tingkat rendah, yakni berawal dari tingkat ranting Tebuireng kemudian menjadi Ketua Pendidikan Ma'arif. Kemudian berlanjut memegang jabatan sebagi ketua MIAI (*Majelis Islam A'la Indonesia)* sampai akhir kependudukan Belanda di indonesia. Kyai Wahid Hasyim juga menjadi Ketua Muda II Majelis Syura Dewan Partai Masyumi. Kyai Wahid Hasyim diangkat menjadi Mentri Agama dalam Kabinet Hatta , Kabinet Sukiman, dan Kabinet Natsir.[9] Pata tanggal 18 April 1953 Kyai Wahid Hasyim mengahadiri rapat Nahdlatul Ulama di Sumedang, Jawa Barat.[10] Dalam perjalanan menuju Sumedang mobil yang ditumpangi Kyai Wahid Hasyim ada empat orang yaitu Kyai Wahid Hasyim duduk di jok belakang dengan Argo Sutjipto, sekertaris Jendral Majalah *Gema Muslimin*. Sedangkan di kursi depan, sopir dan Abdurrahman Ad-Dachil (Gus Dur).

Pada saat itu kondisi perjalanan di daerah Cimindi sedang turun hujan, karena diguyur hujan jalan menjadi licin dan ban mobil selip sehingga sopir tidak bisa mengendalikannya, pada saat itupun mobil melaju kencang zigzag, sedangkan didepan terdapat truk mengerem, mobil membentur bagian

[8] *Ibid*, hal.26

[9] Nur Rokhim, *Kiyai-Kiyai Kharismatik & Fenomenal* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2015), hal.232

[10] Tempo, Seri Tokoh Tempo: Wachid Hasyim (Tokoh Islam DIawal Kemerdekaan), (Jakarta: KPG (Kepustakaan Populer GramedIa, 2011), hal.115

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

belakang truk, setalah itu sopir dan Gus Dur terselamatkan, tapi Kyai Wahid Hasyim terbelanting keluar dan berada di bawah truk, begitupun dengan Argo. Kyai Wahid Hasyim meninggal pada usia 39 tahun, yaitu pada tanggal 20 April 1953. Jenazah Kyai Wahid Hasyim disemayamkan di komplek Pondok Pesantren Tebuireng.[11] Perjuangan K.H. Abdul Wahid Hasyim semasa hidupnya memberikan peran yang penting bagi Bangsa dan Negara Indonesia diantaranya sebagai berikut:

1. Perjuangan K.H. Abdul Wahid Hasyim dalam MIAI (*Majelis Islam A'la Indonesia)*

   MIAI (*Majelis Islam A'la Indonesia)* Majelis ini merupakan tempat diadaknnya permusyawaratan suatu badan perwakilan, yang berdiri dari wakil ataupun utusan dari beberapa perhimpunan yang berdasarkan agama Islam di seluruh Indonesia. Awalnya jabatan Ketua MIAI (*Majelis Islam A'la Indonesia)* di percayakan kepada KH. Hasyim Asy'ari, karena Kyai Hasyim Asy'ari lebih sering berada di Pesantren Tebuireng, sehingga diserahkan kepada Kyai Wahid Hasyim. Kyai Wahid Hasyim menjabat sebagai Ketua MIAI pada tahun 1939 sampai tahun 1943.

2. Perjuangan K.H. Abdul Wahid Hasyim dalam Nahdlatul Ulama (*NU*)

   Aktifnya Kyai Wahid Hasyim di Nahdlatul Ulama dari umur 20 tahun, menitik karir di Nahdlatul Ulama dimulainnya dari posisi yang rendah. Hingga dikemudian hari menjadi Ketua Pendidikan Ma'arif. Nahdlatul Ulama merupakan organisasi yang berbasis tradisional dan

[11] *Ibid,* hal.115

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dipandang disiplin pada soal agama dan moral. Menurut Kyai Wahid Hasyim, tuntutan kepada anggotanya untuk disiplin dan menjalankan kewajiaban agama dianggap menakutkan terutama pemuda ketika masuk Nahdlatul Ulama.[12] Nahdlatul Ulama kurang diminati pemuda, karena dianggap sulit bergerak, berfikir bebas dan berkreatif. Sedangkan pendapat bagi orang yang menginginkan kemajuan Islam tuntutan itu merupakan motivasi untuk mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia. Kyai Wahid Hasyim bergabung dalam organisasi Nahdlatul Ulama pada 1938. Pada mulanya menempati posisi yang sama seperti anggota lainnya. Kemudian pada tahun 1940. Kyai Wahid Hasyim ditunjuk sebagai Ketua Departement *ma'arif* atau pendidikan.[13] Selama memimpin departemen pendidikan, program yang dilakukan Kyai Wahid Hasyim adalah menambah jumlah madrasah di seluruh Indonesia serta meningkatkan kualitas pengajar dan materi pelajaran. Kyai Wahid Hasyim juga memasukkan pengetahua umum dalam kurikulum madrasah Nahdlatul Ulama, seperti yang dilakukan Kyai Wahid Hasyim terhadap pesantren Tebuireng dengan mendirikan madrasah *Nizamiyah* yang mempelajari pengetahuan umum sebagai penyeimbang pengetahuan agama.

B. Pendidikan K.H. Abdul Wahid Hasyim

Kyai Wahid Hasyim kecil terkenal pendiam, peramah dan pandai mengambil hati orang. Pada umur 5 tahun, Kyai Wahid Hasyim belajar

[12] *Ibid,* hal.46
[13] *Ibid,* hal.48

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membaca Al-Qur'an setelah solat Magrib dan Dzuhur. Pagi hari Kyai Wahid Hasyim bersekolah di Madrasah Salafiyah Tebuireng. Pada umur 7 tahun, Kyai Wahid Hasyim mulai belajar kitab kuning diantaranya *fathul-Qarib*, *Muttamimmah* kepada ayahnya. Ketika umur 12 tahun setamatnya dari Madrasah, Kyai Wahid Hasyim mulai mengajar adiknya (A. Karim Hasjim) sedangkan di malam hari mempelajari kitab.[14] Kyai Wahid Hasyim giat dalam mempelajari ilmu-ilmu kesusastraan bahasa Arab. Dengan cara mempelajarinya menggunakan system *muthala'ah* dan membaca sendiri. Kitab-kitab yang serung ditelaahnya yaitu *DiwaNahdlatul Ulamasy-Syu'ara* dan hafalan-hafalan syair-syair dalam bahasa Arab.[15] Kemudian dihimpun dalam sebuah buku tebal. Ketika beerumur 12 tahun, Kyai Wahid Hasyim meghafal syair-syair berbahasa arab.[16]

Kyai Wahid Hasyim melanjutkan pendidikannya. Ketika berumur 13 tahun, Kyai Wahid Hasyim belajar ke Pondok Pesantren Siwalan Panji Sidoarjo. Di Pondok Pesantren Siwalan Panji-Sidoarjo Kyai Wahid Hasyim belajar kitab-kitab *Bidayah, Sulamut Taufiq,* dan *Tafsir Jalalain*. Pengasuh Pondok Siwalan Panji yaitu Kyai Hasjim dan Khozin Panji. Kyai Wahid Hasyim belajar dengan waktu yang sebentar yaitu 25 hari. Awal bulan Ramdhan Kyai Wahid Hasyim masuk ke Pondok Siwalan Panji kemudian Kyai Wahid Hasyim pulang pada hari ke 25 bulan Ramdhan. Pada tahun berikutnya, Kyai Wahid Hasyim melanjutkan pendidikan di Pondok

[14] Aboebakar Atjeh, *Sejarah hidup K.H. Abdul Wahid Hasyim,* cet. Ke-1 (Jombang: Pustaka Tebuireng, 2015), hal.162

[15] *Ibid*, hal. 162

[16] Tempo, Seri Tokoh Tempo: Wachid Hasyim (Tokoh Islam DIawal Kemerdekaan), (Jakarta: KPG (Kepustakaan Populer GramedIa, 2011), hal.20

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pesantren Lirboyo Kediri. Akan tetapi Kyai Wahid Hasyim hanya beberapa hari saja menjadi santri di Pondok Lirboyo-Kediri.[17] Umur 15 tahun Kyai Wahid Hasyim mulai mengenal huruf latin. Kyai Wahid Hasyim juga mempelajari ilmu pengetahuan umum. Sejak itu Kyai Wahid Hasyim berlangganan membaca majalah seperti, "Penyebar Semangat", "Daulat Rakyat", dan "Panji Pustaka".

Sedangkan dari luar negeri Kyai Wahid Hasyim berlangganan "*Ummul Qura*", "*Shautul Hijaz*", "*Al-Latha'iful Muswarah*", "*Kullusyaiin Wad-Dunya*", dan " *Al-Itsnain*". Sejak itu pula Kyai Wahid Hasyim belajar bahasa Belanda dan berlangganan dari "Sumber Pengetahuan" pada saat itu bernama *Majalah Tiga Bahasa*. Kyai Wahid Hasyim mempelajari bahasa Arab dan Belanda. Kemudian setelah tamat mempelajari bahasa Arab dan Belanda Kyai Wahid Hasyim mulai mempelajari bahasa Inggris. Mulai umur 15 tahun Kyai Wahid Hasyim menjadi gemar membaca.[18] Umur 18 tahun Kyai Wahid Hasyim pergi ketanah suci bersama dengan sepupunya yang bernama Muhammmad Ilyas. Pada tahun 1932 Kyai Wahid Hasyim dan Muhammad Ilyas menunaikan ibadah haji, sembari mempelajari dan memperdalam ilmu tafsir, hadits, *Nahwu Shorof,* dan fikih selama dua tahun.[19] Kyai Wahid Hasyim mulai memimpin dan mendidik didalam pesantren Tebuireng pada tahun 1933. Sepulangnya dari Makkah, Kyai Wahid Hasyim mengadakan revolusi dalam dunia pendidikan pesantren. Kyai Wahid Hasyim

[17] Aboebakar Atjeh, *Sejarah hidup K.H. Abdul Wahid Hasyim,* cet. Ke-1 (Jombang: Pustaka Tebuireng, 2015), hal.162

[18] *Ibid*, hal. 162

[19] Tempo, Seri Tokoh Tempo: Wachid Hasyim (Tokoh Islam DIawal Kemerdekaan), (Jakarta: KPG (Kepustakaan Populer GramedIa, 2011), hal.22

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengiginkan perubahan cara pembelajaran di pesantren dari hanya mendengarkan dan memberikan makna pada kitab-kitab fikih, ingin memulai tahap baru dengan sistem kelas.[20]

Kyai Wahid Hasyim melakukan perubahan dalam sistem pendidikan di Pondok Pesantren tidak menimbulkan perpecahan antara muslim sebab itu Kyai Wahid Hasyim tetap menetapkan syarat-syarat revolusi seperti perbedaannya yaitu: *pertama,* menggambarkan tujuan dengan sejelas-jelasnya, *kedua*, menggambarkan cara mencapai tujuan, *ketiga,* memberikan keyakinan dan jalan bahwa dengan sungguh-sungguh tujuan itu dapat terwujudkan.[21] Tujuan Kyai Wahid Hasyim dalam memperbaharui pembelajaran yaitu untuk memajukan pengajaran dan pendidikan Islam di pondok-pondok pesantren. Dengan mengikuti perubahan zaman, Kyai Wahid Hasyim ingin menerapkan metode yang pernah Kyai Wahid Hasyim dapatkan, dan mencurahkan di Pondok Pesantren Tebuireng untuk kemajuan pesantren dalam mendidik santrinya.

Kyai Wahid Hasyim membuka madrasah modern pada tahun 1935. Masdarsah ini diberinama *Nizamiyah.* Suatu perguruan hasil Kyai Wahid Hasyim cabang dari pesantren Islam. Pembelajaran yang terdapat dalam madrasah Nizamiyah seperti pengetahuan umum, diadaknnya pengajaran bahasa Arab, bahasa Belanda dan bahasa Inggris. Tetapi Kyai Wahid Hasyim tetap berpegang pada hadits ”Barang siapa yang mengetahui bahasa suatu golongan, Ia akan aman dari pemerkosaan golongan itu” dan sebuah pepatah

[20] Aboebakar Atjeh, *Sejarah hidup K.H. Abdul Wahid Hasyim,* cet. Ke-1 (Jombang: Pustaka Tebuireng, 2015), hal.169

[21] *Ibid,* hal.169

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bahwa" Bahasa itu adalah kunci dari ilmu pengetahuan"[22] Masdrasah Nizamiyah hanya berdiri satu kelas dengan jumlah murid 29 orang. A. karim Hasjim adik dari Kyai Wahid Hasyim termasuk murid madrasah Nizamiyah. Kemudian karena banyak orang yang kagum akan murid-murid dari madrasah Nizamiyah, selain pandai berbahasa Arab pandai pula berbahasa Belanda dan Inggris, madrasah Nizamiyah mengalami kemajuan yang cukup pesat. Kyai Wahid Hasyim menambah dua kelas, kemudian Nizamiyah terdiri dari tiga kelas.[23]

Kyai Wahid Hasyim selain aktif dalam madrasah Nizamiyah, pada tahun 1936 mendirikan Ikatan Pelajar-pelajar Islam (IKPI) dengan waktu yang tidak lama sudah beranggotakan lebih dari 300 orang.[24] Atas anjuran dari Kyai Wahid Hasyim anggota-anggota dari Ikatan Pelajar-pelajar Islam berlangganan surat kabar dan majalah, diantaranya surat kabar harIan, *Matahari, Suara Umum, Sin Tit Po dan Pejuang.* Sedangkan surat kabar mingguan, yaitu: Pedoman Masyarakat, *Panji Islam, Panji Pustaka, Pustaka Timur Adil dan Pesat* . Kemudian IKPI mendirikan *taman pembacaan* (Bibliotheek) yang menyedIakan kitab-kitab bacaan dalam berbagai bahasa.[25] Guru-guru yang membantu Kyai Wahid Hasyim mengajar di Madrasah

[22] *Ibid*, hal.171
[23] *Ibid*, hal. 172
[24] *Ibid*, hal. 172
[25] Shalahuddin Hamid dan Iskandar Ahza, *Seratus Tokoh Islam, yang berpengaruh di Indonesia*, (Jakarta: IntimedIa, 2003), hal.283.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Nizamiyah dantaranya adalah: A. Wahab Turham, A. Aziz Jar, Nahdlatul Ulamarmandi, Abdurrahman, Abdul Hamid dan A. Karim Hasjim.[26]

C. Keluarga Besar K.H. Abdul Wahid Hasyim

K.H. Abdul Wahid Hasyim putra kelima dari K.H.M. Hasyim Asy,ari dengan Nyai Nafiqoh binti Kyai Ilyas. Dari silsilah ayah bersambung hingga Joko Tingkir, atau tokoh yang dikenal dengan Sultan Sutawijaya yang berasal dari kerajaan Islam Demak. Sedangkan dari pihak ibu, sisilah bersambung hingga Ki Ageng Tarub.[27] Keturunan Kyai Wahid Hasyim dari Nyai Nafiqoh. Anak Kyai Ageng Tarub 1 bernama Kyai Ageng Tarub II, anaknya bernama Kyai Ageng Ketis, Anaknya bernama Kyai Ageng Sila, anaknya bernama Kyai Ageng Saba, anaknya bernama Kyai Ageng Ngalawihan Solo, anaknya bernama Kyai Ageng Pamanahan, anaknya bernama Panembahan Senopati Mataram, , anaknya bernama Pangeran Kajuruan, anaknya bernama Arya Peringgalia, anaknya bernama Raden Paduraksa, anaknya bernama Kyai Raden Panji Darna Santana, anaknya bernama Kyai Ngabdul Ngalim, anaknya bernama Kyai Nala Jaya, anaknya bernama Kyai Basyariah yang bertnama bagus Harun, nenek yang ke-7 dari pihak ibu.[28]

Kyai Basyariah berputrakan Nyai Muhammad Santeri, anaknya bernama Kyai Ma'lum Sewulan, anknya bernama Kyai Mustaram, anaknya

[26] Aboebakar Atjeh, *Sejarah hidup K.H. Abdul Wahid Hasyim*, cet. Ke-1 (Jombang: Pustaka Tebuireng, 2015), hal.173

[27] Mohammad Rifai, Wachid Hasyim: Biografi singkat 19141953.(Jogjakarta:Garasi, 2009), hal.16

[28] Aboebakar Atjeh, *Sejarah hidup K.H. Abdul Wahid Hasyim*, cet. Ke-1 (Jombang: Pustaka Tebuireng, 2015), hal.155

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bernama Nyai Ilyas, anaknya bernama Nyai Muhammad Hasyim Asy'ari atau Nyai Nafiqoh. Nyai Nafiqoh berputra diantaranya, Hannah, Khariyah Hasyim, Aisyah Hasyim, Azzah Hasyim, Abdul Wahid Hasyim, Abdul Hafid Hasyim (Khalik), Abdul Karim Hasyim, Ubaidillah Hasyim, Maruroh Hasyim, dan Muhammad Yusuf Hasyim.[29] Kyai Wahid Hasyim merupakan anak ke-5 dari 10 bersaudara dari pasangan Kyai Hasyim Asy'ari dan Nyai Nafiqoh. Istri Kyai Wahid Hasyim bernama Sholehah putri dari K.H. Bisri Syansuri, Jombang. Sholehah lahir di Jombang 1342 H anak perempuan dari Kyai H. Bisri Syansuri dan Siti Nahdlatul Ulamar Khadijah, adik kandung dari K.H. Abdul Wahab Hasbullah. Pernikahan Kyai Wahid Hasyim dengan Sholehah dikaruniai enam anak yaitu, Abdurrahman Ad-Dhakil (Gus Dur), Aisyah, Sholahuddin Al-Ayyubi, Umar Wahid, Lily Wahid, dan Hasyim Wahid (Gus Lim).[30] Setahun dari pernikahannya lahirlah anak pertamanya pada 4 Sya'ban1361 dengan nama Abdurrahman Ad-Dhakil (Gus Dur), tahun berikutnya melahirkan anak kedua bernama Aisyah. Dan pada 1942 lahir Sholahuddin Wahid.[31]

Dalam kehidupannya sehari-hari Kyai Wahid Hasyim memiliki sifat yang lemah lembut. Kyai Wahid Hasyim selalu membuka pintu rumahnya untuk teman, sahabat dan tamu lainnya untuk berdiskusi ataupun hanya sekedar pembicaraan ringan. Kyai Wahid Hasyim bersikap ramah sesuai dengan ajaran Islam dalam memberlakukan tamu. Begitupun dalam keluarga,

[29] *Ibid*, hal.156

[30] Tempo, Seri Tokoh Tempo: Wachid Hasyim (Tokoh Islam DIawal Kemerdekaan), (Jakarta: KPG (Kepustakaan Populer GramedIa, 2011), hal.27-28

[31] Munawar Ahmad, Ijtihad Politik Gus Dur : Analisis Wacana Kritis.(Yogyakarta: LKiS, 2010), hal.72-73.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kyai Wahid Hasyim mengajarkan sikap disiplin terhadap anak-anaknya dan bersikap tegas dan adil.[32] Menurut Sholahuddin Al-Ayyubi, disiplin, kesabaran dan keramahan Kyai Wahid Hasyim terbentuk dari kebiasaanya berpuasa. Tujuh tahun menjelang wafat, Kyai Wahid Hasyim selalu berpuasa dan tanpa putus kecuali pada hari besar Islam dan hari yang diharamkan berpuasa. Walupun disibukkan dengan kegiatan, Kyai Wahid Hasyim tetap tetap memberikan perhatian terhadap keluarga dan anaknya, Kyai Wahid Hasyim selalu mengantarkan anak-anaknya ke sekolah setiap pagi harinya.[33] Kyai Wahid Hasyim juga sering mengajak anak-anaknya berkunjung ke rumah tokoh politik, seperti rumah Soebarjo, tokoh partai Islam dan ke rumah tokoh Masyumi seperti Mohammad Natsir dan Prawoto Mangkusasmito. Selain itu berkunjung ke tokoh politik yang berbeda paham dengannya, Kyai Wahid Hasyim juga berkunjung dan mengajak anak-anaknya ke rumah Mr Sartono dan Mohammad Yamin tokoh partai Nasional Indonesia. Kyai Wahid Hasyim mengajarkan kepada anak-anaknya dan memberikan kebebasan berpolitik sesuai dengan minat anaknya. Dan mengajarkan tidak membeda-bedakan kan orang dari latar belakangnya.[34]

D. Karya-Karya K.H. Abdul Wahid Hasyim

1. Kumpulan Tulisan K.H. Abdul Wahid Hasyim dibidang Agama
    a. Nabi Muhammad Saw dan Persaudaraan Manusia

[32] Tempo, Seri Tokoh Tempo: Wachid Hasyim (Tokoh Islam DIawal Kemerdekaan), (Jakarta: KPG (Kepustakaan Populer GramedIa, 2011), hal.58-59
[33] *Ibid,* hal.59
[34] *Ibid,* hal.32

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Kebangkitan Dunia Islam

c. Beragamalah dengan Sungguh dan Ingatlah Kebesaran Tuhan

2. Kumpulan Tulisan K.H. Abdul Wahid Hasyim dibidang Politik

a. Perkembangan Politik Masa Pendudukan Jepang

b. Apakah Meninggalnya Stallin membawa Pengaruh pada Umat Islam? Juga pada Umat Islam di Indonesia?

c. Dibelakang Layar Perebutan Kekuasaan Jenderal Najib di Mesir

d. Umat Islam Indonesia dalam Menghadapi Perimbangan Kekuatan Politik dari Partai-Partai dan Golongan-Golongan

e. Menyongsong Tahun Proklamasi Kemerdekaan yang Kedelapan

3. Kumpulan Tulisan K.H. Abdul Wahid Hasyim dibidang Pergerakan

a. Masyumi Lima Tahun

b. Mengapa Saya Memilih Nahdlatul Ulama?

c. Analisis Kelemahan Penerangan Islam

4. Kumpulan Tulisan K.H. Abdul Wahid Hasyim di bidang Perjuangan Umat Islam

a. Fanatisme dan Fanatisme

b. Siapakah yang akan menang dalam Pemilihan Umum yang Akan Datang?

c. Akan menangkah Umat Islam Indonesia dalam Pemilihan Umum yang Akan Datang?

d. Kedudukan Ulama dalam Masyarakat Islam di Indonesia

e. Amanat Menteri Agama

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

f. Umat Islam Indonesia menunggu Ajalnya, tetapi Pemimpin-Pemimpinnya Tidak Tahu

5. Kumpulan Tulisan K.H. Abdul Wahid Hasyim dibidang Pendidikan dan Pengajaran
   a. Abdullah Ubaid sebagai Pendidik
   b. Kemajuan Bahasa Berarti Kemajuan Bangsa
   c. Pendidikan Ketuhanan
   d. Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri
   e. Pentingnya Terjemah Hadits pada Masa Pembangunan
6. Kumpulan Tulisan K.H. Abdul Wahid Hasyim dibidang Kata Pendahuluan Agenda Kementerian Agama
   a. Tuntutan Berpikir
7. Kumpulan Tulisan K.H. Abdul Wahid Hasyim dibidang Mistik dan Kebatinan
   a. Islam antara Materialisme dan Mistik
8. Kumpulan Tulisan K.H. Abdul Wahid Hasyim dibidang Kementerian Agama
   a. Sekitar Pembentukan Kementerian Agama
   b. Penyusunan Kementerian Agama RIS
   c. Kedudukan Islam di Indonesia
   d. Tugas Pemerintah terhadap Agama
   e. Membangkitkan Kesadaran Beragama
9. Kumpulan Tulisan K.H. Abdul Wahid Hasyim dibidang Urusan Haji

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Perbaikan Perjalanan Haji

b. Mengatur Urusan Haji

c. Laporan Perjalanan ke Jepang

10. Kumpulan Tulisan K.H. Abdul Wahid Hasyim dibidang Menghadapi Revolusi

a. Melenyapkan yang Kolot

b. Kebangkitan Dunia Islam[35]

[35] Aboebakar Atjeh, *Sejarah Hidup KH. A. Wahid Hasjim*, (Jombang : Pustaka Tebuireng,2015), h.754.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Kiprah K.H. Abdul Wahid Hasyim Dalam Partai Masyumi

K.H. Abdul Wahid Hasyim merupakan sosok tokoh ulama Indonesia yang begitu berkharismatik, beliau dengan sebuah kecerdasannya yang ia miliki membuat para pemerintah Jepang mempercayainya untuk menjadi salah satu perwakilan dari tokoh ulama NU muda, semenjak tahun 1939 K.H. Abdul Wahid Hasyim sudah diberi kepercayaan untuk menjabat menjadi Ketua MIAI (Majelis Islam A'la Indonesia), salah satu wadah dari beberapa ormas yang ada di Indonesia NU, Al-Irsyad, PSII, Muhammadiyah, PII, dan Persis, yang mana pembentukan organisasi tersebut oleh pemerintahan Jepang di tujukan untuk memperdayai para tokoh islam yang ada di Indonesia agar bisa bersatu dan berkerjasama dengan pemerintahan jepang serta agar bisa memperdayai masyarakat. Pada saat K.H. Abdul Wahid Hasyim menjadi ketua di MIAI, beliau juga menduduki jabatan kepemimpinan Presidium Korindo (Kongres rakyat Indonesia), suatu proyek perjuangan tanpa lelah bersama GAPI (Gabungan Partai Politik Indonesia). Setelah sekian lama berjalan organisasi MIAI yang di ketuai oleh K.H. Abdul Wahid Hasyim membuat pemerintahan Jepang khawatir akan adanya perlawanan yang di lakukan oleh badan organisasi tersebut, sehingga Jepang membubarkannya dan membentuk organisasi baru yakni bernama Masyumi (Majelis Syuro Muslim Indonesia), dalam pembentukan organisasi Masyumi tidaklah jauh

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dari penggabungan organisasi islam yang sebelumnya terkempul di dalam MIAI akan tetapi dalam hal kepengurusan yakni organisasi Masyumi di Pimpin sendiri oleh ayahan dan K.H. Abdul Wahid Hasyim sendiri.

Dalam masa penjajahan jepang banyak masyarakat Indonesia tidak lagi percaya akan keberadaannya yang kian lama membuat rakyat menjadi sengsara serta membuat rakyat merasakan kelaparan di berbagai daerah, masyarakat Indonesia yang terkenal mayoritas islam membuat pemerintah jepang tidak tinggal diam, pemerintah jepang yang sempat menahan K.H. Hasyim Asy'ari ini di karenakan penolakannya atas terselenggarannya tempat cukkir atau dikenal sekarang perjudian, membuat K.H. Abdul Wahid Hasyim ikut serta dalam badan organisasi yang di bentuk jepang yakni MIAI, tujuan K.H. Abdul Wahid Hasyim mengikuti organisasi tersebut selain ingin mempersatukan organisasi islam akan tetapi ingin membebaskan sang ayah dari tahanan pemerintah jepang yang mana sempat beralih tempat tahanan yang dimiliki jepang. Sekilas hasil dari pembentukan organisasi MIAI tersebut ialah adanya sebuah terobosan baru untuk masyarakat yang mengalami kemiskinan atau kelaparan tersebut dengan adanya suatu usaha yang berupa kegiatan non politik yakni mendirikan usaha amil zakat atau bait al mal, kegiatan tersebut memang di peruntukkan membantu orang-orang tidak mampu secara besar-besaran sehingga mengalahkan usaha kegiatan biro ke agamaan yang di bentuk oleh pemerintah jepang pada masanya. Selama zaman kependudukan Jepang K.H. Abdul Wahid Hasyim juga merupakan tokoh sentral di kalangan Umat Islam. K.H. Abdul Wahid Hasyim juga

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjabat sebagai anggota Chuuo Sangi In yakni semacam DPR ala Jepang. Dengan jabatan tersebut K.H. Abdul Wahid Hasyim dapat menyakinkan tentara Jepang untuk mendirikan sebuah badan yang menghimpun kalangan ulama. Maka terbentuklah lembaga yang bernama Shumubu, yaitu lembaga Urusan Agama Islam yang susunannya terdiri dari: K.H. Hasyim Asy'ari selaku Ketua, K.H. Abdul Kahar Muzakir selaku Wakil Ketua I dan K.H. Abdul Wahid Hasyim selaku Wakil Ketua II.

Setelah di percayai menjabat sebagai ketua lembaga yang bernama Shummubu K.H Hasyim Asy'ari tidak dapat lagi aktif di karenakan sedang memangku Pesantren Tebuireng, maka jabatan ketua sehari-hari dipegang oleh K.H. Abdul Wahid Hasyim. Badan inilah yang menjelma menjadi Departemen Agama (setelah proklamasi 17 Agustus 1945) Taktik politik yang dijalani K.H. Abdul Wahid Hasyim di zaman Jepang ialah, mengambil unsur kekuasaan Jepang yang positif bagi perjuangan mencapai kemerdekaan Indonesia. "Kerja sama" dengan Jepang (pada tingkatan pertama) dipandang perlu sebab bangsa Indonesia yang tidak mempunyai kekuatan politik (kekuasaan) di zaman Belanda tidak akan sanggup menghadapi kekuatan Militer Jepang yang tengah berada dipuncak kemenangan.

Dalam karangan tulisan dari K.H. Abdul Wahid Hasyim menjelaskan bahwa pada masa penjajahan jepang system perpolitikan sangat lemah dan mengikuti alur perpolitikan jepang yang berupa sistem pemerintahan dictator atau dikenal dengan kata lain sistem perpolitikan nipponisme, system pemerintahan jepang yang berupa seperti system pendidikan dalam militer ini

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

banyak membuat masyarakat kecil seakan harus tunduk dengan beberapa dari golongan atas seperti aparat kepolisian yang di anggapnya selalu benar dan harus di patuhi sehingga bagi yang tidak patuh akan di katakana bagian dari anti-nippon.

Dari segi perekonomian dalam hal ini di jelaskan pada karangan tulisan K.H. Abdul Wahid Hasyim bahwasannya system perekonomian yang di berlakukan pemerintah jepang sangat membuat masyarakat Indonesia bertambah sengsara di karenakan lemahnya dan kelumpuhan mereka dalam menghadapi blockade sekutu terhadap perekonomian yang ada sehingga menimbulkan berbagai kelaparan dan kekurangan makanan yang menyebabkan kematian dimana-mana dan tidak kecil jumlah.

Adapun dalam tulisan karya dari K.H. Abdul Wahid Hasyim yang lain menjelaskan ada beberapa perbedaan aliran dalam masa pendudukan jepang dimana saat dirinya masih menjabat dalam keanggotaan pengurus masyumi yakni menjelaskan tentang aliran para tenaga kerja (romusa) yang dikirim untuk adanya pelaksanaan perang yang mana hanya membuat kesesengsaraan masyarakat kecil menjadi berlipat ganda. Dengan adanya system pemerintahan jepang yang berjalan kian hari membuat kesengsaraan rakyat menjadi begitu hebat yang mana para tenaga kerja tersebut mendapatkan perlakuan yang begitu bengis yang di tujukan untuk keperluan perang terutama pada rakyat yang di kirim ke polsek asia "Timur Raya". Adanya perlakuan tersebut membuat rakyat semakin merasa tergencet sehingga

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menimbulkan perasaan benci terhadap jepang, dan membuat gelora perasaan rakyat ingin secepatnya merdeka.

K.H. Abdul Wahid Hasyim sangatlah paham dengan prinsip siyasah (politik) ya ada di Islam. Ketika kepemimpinan Partai Masyumi pada masa pendudukan Jepang berada di tangannya, beliau dengan leluasa mengobarkan api juang semangat kemerdekaan. Melalui majalah Suara Muslimin Indonesia, seperti suara-suara yang merupakan anti penjajahan, meskipun tidak secara langsung menyerang Jepang. Pada sebuah edisi pada tanggal 15 Agustus tahun ‘44, misalnya, dimuatlah sebuah pidato ayah K.H. Abdul Wahid Hasyim di depan para ulama se–Jawa yang pada saat itu berada di Bandung, 30 Juli 1944. Di dalam artikel yang oleh K.H. Abdul Wahid Hasyim, Belanda dikritik, Jepang dipuji. tetapi isinya sudah jelas supaya jangan sampai mempercayai orang-orang kafir. "Yang membuat janji-janji baik bagi kamu sekalian dengan mulutnya, sedangkan hatinya tidak menyukai, dan kebanyakan mereka itu orang-orang yang fasik atau jahat," kata Kyai Hasyim Asy'ari yang mengutip di dalam surat Al-Quran. Kyai Hasyim Asy'ari mendeskripsikan kebejatan dan kekerasan para penjajah dari Belanda. Namun ada informasi kalau Jepang pun tidak jauh berbeda dengan Belanda, yakni sama-sama menjadi penjajah.

K.H. Abdul Wahid Hasyim di samping mengelola majalah, beliau juga mendirikan sebuah Badan Propaganda Islam. Para anggota dari Badan tersebut sangat giat dalam berorasi dengan lantang di corong radio dan juga di tempat-tempat rapat. Di Taman Raden Saleh, ketika itu tanggal 13 September

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1944, sebelum kemerdekaan Indonesia, di dalam sebuah rapat yang besar bagi umat Islam, Kyai Wahid Hasyim berpidato berkobar-kobar di depan ratusan dan bahkan ribuan orang. Beliau mengutip firman Tuhan dalam Al - Quran: "Mereka itu memandang masa itu jauh, dan (Allah) memandangnya dekat."

Kyai Wahid Hasyim sangat yakin kalau kemerdekaan bangsa Indonesia sudah semakin dekat. "Sesungguhnya sudah dekatlah masa. Kini telah datang tanda-tandanya masa yang kita tunggu -tunggu itu, masa yang gilang-gemilang, masanya kita bangsa Indonesia hidup sebagai bangsa yang harus dihormati dan dihargai orang."

Di dalam salah satu pidatonya, Kyai Wahid pun mengingatkan betapa pentingnya sebuah kemerdekaan itu, dan menyinggung pemerintahan Jepang. "Kita tentu tak dapat menghargai kenikmatan Allah SWT yang diberikan dengan perantaraan Dai Nippon Teikoku, yaitu kemerdekaan di kemudian hari itu." Tetapi Kyai Wahid juga menyisipkan beberapa pesan yang membuat beliau tidak nyaman hidup di bawah kekerasan, pemerasan, dan penindasan, sembari menyebut Belanda. Dia tambahkan, "Kaum penjajah itu sama sekali tidak memikirkan kemanusiaan. Tidak mengenal keadilan dan tidak tahu arti belas kasihan...."

Adanya sebuah keberanian yang dimiliki oleh Kyai Wahid Hasyim ini karena dia punya strategi politik mendekati Jepang. Perkenalan beliau dengan "saudara tua" itu berawal dari pembubaran Pondok Pesantren yang ada di Tebuireng serta dilarangnya ormas NU tidak begitu lama sesudah Dai

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Nippon menguasai Jawa pada tahun 1942. Ayahanda beliau, ditangkap lalu dicebloskan ke dalam penjara yang ada di Surabaya. K.H. Hasyim Asy'ari dituduh sebagai tokoh ulama yang propokator yang memiliki pengikut untuk mengobarkan dan membangkitkan semangat untuk berjihad guna melawan penjajah yang ada. Dengan kondisi yang parah seperti ini, Kyai Wahid Hasyim pergi ke Jakarta untuk mencari relasi para pejabat Jepang di sana.

Di sana, selain membawa bala tentara, Jepang juga membawa orang-orang yang faham betul dengan syariat Islam, seperti Kolonel Horie dan Abdul Hamid Nobuharu Ono, dengan panggilan akrabnya Hamid Ono, para pegawai kantor rahasia milik Jepang yang berada di Jl. Menteng no. 46 Jakarta. Adapun Hamid Ono adalah seorang yang berkenalan Wahid Hasyim di suatu tampat Jawa Timur, jauh sebelum tantara Jepang masuk ke Indonesia. Ono begitu kagum dengan NU. Ia hampir selalu mengenakan hitam di kala hadir dalam sebuah majelis K.H. Hasyim Asy'ari di Jombang. Ono mengawini seorang wanita yang berasal dari Sedayu, Gresik. Ia sering mengendarai sepeda dari rumah istrinya ke Tebuireng Jombang, guna bersiraturrahim dengan Kyai Hasyim. Kebebasan Kyai Hasyim Asy'ari dari penjara adalah berkat bantuan daru Hamid ono. Setelah itu, Tebuireng mulai dibuka kembali pada akhir tahun 1943. Perkenalan Kyai Wahid Hasyim dengan Hamid Ono menjadikan K.H. Wahid Hasyim diajak melancong oleh Hamid Ono ke negaranya. Di sana beliau mencetak Al -Quran dengan besar-besaran, dan juga menjalani bisnis yang lain, misalnya membeli kapal laut buat pergi haji dan mesin cetak huruf Arab.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Relasi beliau dengan Jepang menjadikannya sibuk di Jakarta sebagai "kepanjangan tangan" dari Jepang bersama tokoh-tokoh pergerakan yang lain menuju kemerdekaan serta untuk urusan yang berkaitan dengan agama. Menkipun dikira oleh sementara orang sebagai "tangan" Jepang, Kyai Wahid adalah termasuk orang yang menolak rencana Jepang memanfaatkan Masyumi sebagai cara mengerahkan rakyat biasa bekerja dengan paksa (romusha).

Ketika penjajahan Jepang itu, pada tanggal 24 Oktober 1943, Kyai Wahid Hasyim dipasrahi untuk menduduki sebagai pemimpin Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi), sebagai ganti dari Majelis Islam A'la Indonesia (MIAI), yang menurut Kyai Wahid sudah "diperkosa" oleh Jepang.

Ketika menjabat sebagai Wakil Ketua Masyumi, Kyai Wahid Hasyim mendirikan sebuah kelompok Barisan Hizbullah, yang bertujuan agar bisa membantu dalam perjuangan umat Islam menegakkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Jepang waktu itu sempat merasa curiga terhadap apa yang dibentuk itu, karena serupa dengan ketentaraan, namun Kyai Wahid Hasyim merespon bahwa sesungguhnya pembentukan itu demi kemenangan Asia Timur Raya. Di samping berpatisipasi di dalam gerakan perpolitikan, pada 1944 Wahid membangun Sekolah Tinggi Islam di Jakarta yang diasuh langsung oleh Abdul Kahar Muzakkir. Ketika mendekati kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, Kyai Wahid Hasyim ditunjuk sebagai anggota Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), yang dibentuk oleh Jepang sendiri pada tanggal 29 April tahun 1945 dengan nama

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam bahasa Jepang, yaitu Dokuritsu Junbi Cosakai. Di gedung yang kini dinamai dengan Gedung Pancasila. Kementerian Luar Negeri menggelar rapat pertamanya BPUPKI pada tanggal 28 Mei 1945, yang bertema tentang dasar negara. Tiga orang yang mengusulkannya yaitu: Muhammad Yamin, Soepomo, dan Soekarno. Namun, sampai akhir rapat, belum juga terdengar kesepakatan, terutama dari kelompok Islam yang meminta persoalan penerapan hukum Islam di dalam negara Indonesia juga dimasukkan. Samapi akhirnya, dibentuklah sebuah tim kecil yang beranggotakan 9 orang, yang dipimpin sendiri oleh Bung Karno. Kyai Wahid Hasyim juga termasuk anggotanya. Dari sana lah Kyai Wahid bertemu langsung dengan Soekarno dan Hatta secara intens.

Pada tanggal 7 Agustus 1945 BPUPKI dibubarkan oleh Jepang kemudian PPKI dibentuk. Di dalam kepanitiaan itu K.H. Wahid Hasyim juga termasuk menjadi anggota di dalamnya yang kebtulan dipimpin oleh orang yang sama yaitu Soekarno-Hatta. Kemudian masalah tujuh kata yang terdapat atau tercantum di dalam Piagam Jakarta, Ketuhanan "dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya", dapat dihapuskan. Pada saat diadakan rapat pada tanggal 18 Agustus 1945, Bung Hatta menemui Soekarno dan beliau bicara kepada Bung Karno bahwa, "Saya telah membahasnya dengan Kyai Wahid."

Harus diakui beberapa tokoh Islam ada yang merasa kecewa dengan dihapusnya tujuh kata itu. "Namun tidak akan ada tokoh Islam yang mau bermusuhan dengan Kyai Wahid," pungkas Zamakhsyari Dhofier, seorang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang menulis buku tentang biografi Wahid Hasyim. Tidak dapat dipungkiri lagi, karena taktik dan pemikirannya di masa pendudukan Jepang, dan kerja kerasnya dalam "merampungkan" permasalahan-permasalahan pada saat mendekati kemerdekaan bangsa kita, Indonesia yang bersatu sekaligus beranekaragam bisa diwujudkan. "Wahid Hasyim sejak awal memandang persatuan bangsa menjadi yang utama. Komitmennya terhadap NKRI kafah," kata Dhofier.

B. Strategi Politik K.H. Abdul Wahid Hasyim dalam Partai Masyumi pada 1943-1950

Strategi-strategi cerdas ini, dapat kita lacak dari sosok **K.**H. Abdul Wahid Hasyim. Ayahanda Gus Dur ini, merupakan sosok kiai yang cerdas dalam menghimpun kawan serta tenang menghadapi lawan. Ia merupakan cermin, betapa ilmu santri itu luas tidak bertepi, dari ilmu agama hingga ilmu intelijen, dari penguasaan hukum Islam hingga diplomasi politik. K.H. Abdul Wahid Hasyim piawai dalam memainkan jurus diplomatik. Jurus-jurus diplomatik Kiai Wahid diuji ketika ia menghadapi Jepang, pada proses menuju kemerdekaan Indonesia. Ketika Jepang merangsek sebagai penjajah, atau Saudara Tua di Asia Timur Raya, mereka dikenal bengis dan brutal dalam merampungkan operasi militer. Pada awalnya, pihak Jepang menjepit para kiai pesantren, bahkan beberapa dijebloskan ke penjara. Hadratus Syaikh Hasyim Asy'ari (1875-1947) termasuk kiai yang dijeblokasn ke penjara. Inilah tantangan berat bagi para kiai NU dan pengasuh pesantren. Sikap NU

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terhadap rezim kolonial Jepang lebih lunak dibandingkan dengan sikap terhadap Belanda. Pada titik tertentu, NU menjalin kerjasama dengan Jepang, ketika menerima tawaran dalam pembentukan Kementrian Agama, serta pengerahan milisi sipil dalam Hizbullah dan Sabilillah. Pemerintah Jepang berusaha menarik dukungan dari kekuatan dari kelompok anti-Belanda dengan menggandeng ormas-ormas Islam. Pemerintah Jepang mengundang 32 ulama, di antaranya Kiai Hasyim Asy'ari, Kiai Mahfudz Siddiq dan K.H. Abdul Wahid Hasyim, dalam sebuah pertemuan di Jakarta. Pada agenda ini, Kepala Pemerintah Militer Jepang (Gunseikan) minta maaf kepada umat Islam, tentang polisi militer Jepang yang dianggap brutal. Dari pihak Jepang, mereka beralasan karena para polisi militer tidak memahami budaya dan karakter umat Islam. Bahkan, setelah pertemuan ini, pemerintah Jepang terlihat lebih bersahabat dengan kelompok muslim, dan menghapus upacara Seikere (penyembahan dewa Matahari). Pada November 1943, atas diplomasi K.H. Abdul Wahid Hasyim dan kiai pesantren, terbentuklah Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi). Awalnya, Masyumi dipimpin oleh Kiai Hasyim Asy'ari. Namun, karena kesibukan mengasuh pesantren dan kondisi fisik yang sudah sepuh, kewenangan mengomando Masyumi dipegang oleh K.H. Abdul Wahid Hasyim, putra Hadratus Syaikh (Khuluq, 2000: 142). Dalam struktur kepengurusan, Masyumi dipenuhi oleh tokoh-tokoh Islam yang tersebar dari berbagai tradisi dan organisasi. Dari NU, Muhammadiyah dan beberapa ormas Islam. Tujuan Masyumi, yakni mengkoordinasi para ulama serta mengusung semangat juang untuk cita-cita

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kemerdekaan. Di sisi lain, ada pula usaha untuk mengumpulkan dana umat dari pengelolaan pertanian yang kemudian disetorkan ke baitul mal. Di antara pengelola unit usaha ini, yakni Faqih Usman, Ghafar Ismail, Sukiman dan K.H. Abdul Wahid Hasyim. Inilah unit usaha yang berusaha untuk memperjuangkan ekonomi dan kesejahteraan warga muslim. Perjuangan di bidang pendidikan juga digarap dengan serius. K.H. Abdul Wahid Hasyim mengajak beberapa rekannya untuk bergerak mengembangkan pendidikan. Di antaranya: Drs Ahmad Sigit, M Natsir, Kiai Muhammad Junaidi, dan beberapa tokoh penggerak lainnya (Syamsul AH, 2003: 80-83) Di bidang pers, Kiai Wahid juga mendorong para tokoh pemuda untuk berkontribusi. Yakni mendirikan majalah 'Suara Muslimin' yang dikelola oleh Kiai Saifuddin Zuhri, Harsono Cokroaminoto dan beberapa jurnalis lainnya. Di bidang diplomasi militer, Kiai Wahid bergerak untuk meyakinkan Jepang pentingnya membentuk laskar komando dari pemuda muslim. Maka, terbentuklah Hizbullah yang dipimpin oleh Kiai Zainul Arifin, pejuang tangguh dari Tanah Barus. Awalnya, Hizbullah dimaksudkan untuk menjadi paramiliter yang bertugas di garis depan komando militer Jepang. Tujuan politis Jepang, yakni menjadikan para pemuda muslim sebagai tameng dari serbuan musuh. Namun, dengan canggih dan jitu, Kiai Wahid berhasil meyakinkan pihak otoritas militer Jepang, agar menempatkan Hizbullah di dalam negeri. Argumentasi Kiai Wahid, tentu putra bangsa akan semakin semangat jika mempertahankan tanah airnya. Laskar Hizbullah terbentuk karena latar belakang berperang dalam mempertahankan agama Islam, wajib

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hukumnya. Pada saat itu, Jepang berusaha menggiring para pemuda masuk komando Heiho. Abdul Hamid Nobuharu Ono, utusan Jepang, melakukan lobi politik kepada K.H. Abdul Wahid Hasyim. Hamid Ono, merupakan utusan diplomatik pemerintah Jepang untuk mendekati para kiai pesantren. Ono merupakan muslim dan pernah beribadah haji, bersamaan dengan utusan lain, yakni Abdul Munim Inada, Saleh Suzuki, Mohammad Taufik Sasaki, dan Abdul Munir Watanabe (Abdul Aziz, 2012: 201). Di sinilah kecerdikan Kiai Wahid teruji. Ia tidak menolak permintaan Jepang, namun menggeser kepentingang dengan menggabungkan para pemuda muslim, yang mayoritas sebagai santri dan terkoneksi dengan jaringan pesantren, masuk dalam barisan Hizbullah. Para milisi Hizbullah mendapatkan pelatihan dari militer Jepang, hingga terlatih menghadapi perang dengan strategi-strategi taktis. Kelak, Hizbullah menjadi tulang punggung dalam perjuangan kemerdekaan, dari kalangan santri-kiai. Hizbullah menjadi referensi bagaimana pejuang muslim bergerak untuk mempertahankan tanah air, dengan segenap usaha, tangis dan darah juang. Hizbullah secara resmi dibentuk pada 14 Oktober 1944. Slogannya yang terkenal: isy kariiman au mut syahiidan (hidup mulia atau mati syahid). Laskah Hizbullah merupakan laskar santri, yang tersebar di beberapa kawasan dengan jaringan santri. Para ulama membentuk Laskar Sabilillah yang dikomando Kiai Masykur dan Laskar Mujahidin yang dipimpin Kiai wahab hasbullah

Perjuangan K.H. Abdul Wahid Hasyim semasa hidupnya memberikan peran yang penting bagi Bangsa dan Negara Indonesia diantaranya sebagai

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berikut:

1. Perjuangan K.H. Abdul Wahid Hasyim dalam Masyumi (*Majelis Syuro Muislimin Indonesia*)

   Pada awalnya Masyumi diketuai oleh ayahnya Kiai Hasyim Asy'ari. Sedangkan K.H. Abdul Wahid Hasyim menempati posisi wakil ketua muda II. Karena kesibukan Hasyim Asy'ari maka tugasnya dilimpahkan kepada K.H. Abdul Wahid Hasyim.

2. Perjuangan K.H. Abdul Wahid Hasyim dalam Liga Muslim

   Susunan kepengurusan Liga Muslim yaitu: Ketua, K.H. Abdul Wahid Hasyim,wakil ketua I, Abikusno Tjokro Sujoso, Wakil Ketua II, H. Sirajuddin Abbas.[1] Setiap adanya kejadian besar secara langsung maupun tidak langsung mengenai kepentingan negara dan masyarakat Islam khususnya. Liga Muslim mengadakan sidang musyawarah, untuk mengeluarkan sikap dalam stetmen-stetmen dalam menghadapi pembentukan kabinet baru sesudah kabinet Wilopo (7 Juni 1953) dan tentang Turisina dan Maroko (24 Desember 1952). Dan pengiriman sebuah Misi Persahabatan (*Goodwill Mission*) yaitu, mengunjungi negara-negara Islam di sekitar Timur Tengah.[2] Latar belakang berdirinya Liga Muslim, karena kekecewaan Nahdlatul Ulama terhadap Partai Masyumi atas kebijakan politik partai yang diputuskan yaitu perubahan status Majelis Syuro Partai. Sebagian besar anggotanya berasal dari ulama Nahdlatul

[1] Aboebakar Atjeh, *Sejarah hidup K.H. Abdul Wahid Hasyim*, cet. Ke-1 (Jombang: Pustaka Tebuireng, 2015), hal.663

[2] *Ibid*, hal.663

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ulama dan menjadi penasihat. Keputusan ini diputuskan pada Kongres Masyumi 1949 di Yogyakarta. Kebijakan ini dianggap sebagai upaya untuk memperkecil peranan dan kedudukan para ulama dalam partai.[3]

3. Perjuangan K.H. Abdul Wahid Hasyim dalam Bidang Pendidikan

Madrasah Nizamiyah dibentuk pada tahun 1943, madrasah Nizamiyah menjadi terobosan pendidikan dikalangan NU karena untuk pertama kalinya ada pesantren yang mengembangkan pendidikan umum. Lembaga dipesantren pada awalnya Madrasah Salafiyah. Ide pembentukan Madrasah Nizamiyah didalam pesantreen Tebuireng, datang dari anak pemilik pesantren K.H. Muhammad Hasyim Asy'ari, yaitu K.H. Abdul Wahid Hasyim. Setelah pulang dari pendidikannya di Makkah pada 1933, K.H. Abdul Wahid Hasyim mengusulkan untuk mengubah sistem pendidikan pesantren, seperti *Sorogan* atau *bandongan* dengan model kelas, seperti di sekolah model barat. K.H. Abdul Wahid Hasyim juga mengusulkan perubahan radikal dalam sistem pengajaran di Pesantren. Usulnya yaitu sistem *bandongan* diganti dengan sistem *tutorial* yang sistematis yang bertujuan untuk mengembangkan inisiatif dan kepribadian para santri. Santri tidak hanya diberi pelajaran tentang kitab-kitab klasik Islam tetapi juga pelajarn umum. Pada tahun 1950, Kiyai K.H. Abdul Wahid Hasyim menjelaskan usul perubahannya yaitu; mayoritas santri

[3] Mohammad Rifai, Wachid Hasyim: Biografi singkat 19141953.(Jogjakarta:Garasi, 2009), hal.72

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang belajar di lembaga pesantren tidak semua bertujuan untuk menjadi Ulama.[4]

Wahid Hasyim berpendapat bahwa pengajaran kitan-kitab asli Islam dalam bahasa Arab hendaknayaterbatas bagi sejumlah kecil santri yang akan dididik untuk menjadi Ulama. Akan tetapi usul-usul K.H. Abdul Wahid Hasyim tidak disetujui oleh Kiyai Hasyim Asy'ari karena menurutnya perubahan radikal akan menciptakan kekacauan antara sesame pemimpin pesantren. Kiai Hasyim Asy'ari hanya menyetujui usul K.H. Abdul Wahid Hasyim untuk pendiriam madrasah Nidzamiah pada tahun 1934.[5] K.H. Abdul Wahid Hasyim ketika menjadi Menteri Agama memberikan tiga kebijakan mengenai sistem pendidikan. Terdapat peraturan pemerintah pada 20 Januari 1950 yang mewajibkan pendidikan dan pengajaran agama dilingkungan sekolah umum, sebagai bagian dari kurikulum pendidikan nasional. Gagasan tentang pendidikan agama baik negeri maupun swasta. K.H. Abdul Wahid Hasyim menyadari bahwa sejak kita mengadopsi sistem Barat yang skuler, banyak hal yang hilang dari sistem pendidikan nasional yakni nilai dan moral.[6]

K.H. Abdul Wahid Hasyim mendirikan Sekolah Guru dan Hukum Agama di Malang, Yogyakarta, Bandung Bukitinggi dan Banda Aceh. K.H. Abdul Wahid Hasyim pun mendirikan pendidikan guru di

[4] Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren: Studi Tentang Pandangan Hidup Kyai*, (Jakarta: LP3ES, 1987), hal. 105

[5] *Ibid*, hal 106

[6] Tempo, Seri Tokoh Tempo: Wachid Hasyim (Tokoh Islam DIawal Kemerdekaan), (Jakarta: KPG (Kepustakaan Populer GramedIa, 2011), hal.77

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pamekasan, Salatiga, Bandung, Jakarta, Tanjung Karang, Padang, Banda Aceh, Tanjung Pinang dan Banjarmasin.[7] Pendirian pendidikan Islam merupakan buah pemikiran K.H. Abdul Wahid Hasyim, bahwa tenaga pendidik masih minim akan ilmunya untuk menjadi seorang guru karena mereka hanya lulusan HIS (*Hollandesch Inlandsche School*), sebab dari itu K.H. Abdul Wahid Hasyim mendirikan pendidikan guru disetiap Kabupaten agar mendapatkan peningkatan dalam hal pendidikan. K.H. Abdul Wahid Hasyim juga mendirikan Sekolah Tinggi Islam. Sekolah ini diasuh oleh K.H. Kahar Muzakkir Jakarta 1944. Kemudian sekolah tinggi ini berubah menjadi Universitas Islam Indonesia (UII), di Yogyakarta. Dengan empat fakultas; pendidikan, Agama, Hukum dan Ekonomi. Pada saat K.H. Abdul Wahid Hasyim menjabats sebagai menteri Agama pada 1950 UII diresmikan menjadi Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (PTAIN) dalam peraturan Presiden Nomor 34 Tahun 1950 pada tanggal 14 Agustus 1950.[8] Terbentuknya Perguruan Tinggi Agama Islam, merupakan suatu kemajuan dalam hal pendidikan di Indonesia, pada masa K.H. Abdul Wahid Hasyim menjadi Menteri Agama nenaruh perhatian atas kemajuan pendidikan.

[7] *Ibid*, hal. 78
[8] *Ibid*, hal. 79

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa K.H. Abdul Wahid Hasyim mempunyai kontribusi dalam perkembangan partai Masyumi. Wachid Hasyim mempunyai strategi politik dengan mengobarkan semangat merdeka melalui majalah dan membentuk anggota-anggota yang giat berorasi di corong radio dan dirapat-rapat umum. Wachid Hasyim juga membentuk Laskar militir Hizbullah untuk membantu perjuangan bangsa Indonesia dalam mencapai kemerdekaan. Anggota dari Laskar Hizbullah terdiri dari ulama, santri dan pemuda bangsa Indonesia. Pembentukan Laskar Hizbullah bertujuan untuk mendidik masyarakat Indonesia dalam ke-militeran. K.H. Abdul Wahid Hasyim juga memecahkan permasalahan haji dengan membentuk panitia haji Indonesia untuk kelangsungan keberangkatan jamaah haji Indonesia. Tujuan didirikannya panitia haji Indonesia untuk meningkatkan pengetahuan dan perjalanan haji di Indonesia.

Abdul Wahid Hasyim dipercaya menjabat sebagai Ketua MIAI (Majelis Islam A'la Indonesia), Setelah sekian lama berjalan organisasi MIAI yang di ketuai oleh K.H. Abdul Wahid Hasyim membuat pemerintahan Jepang khawatir akan adanya perlawanan yang di lakukan oleh badan organisasi tersebut, sehingga Jepang membubarkannya dan membentuk organisasi baru yakni bernama Masyumi (Majelis Syuro Muslim Indonesia),

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam pembentukan organisasi Masyumi tidaklah jauh dari penggabungan organisasi islam yang sebelumnya terkempul di dalam MIAI akan tetapi dalam hal kepengurusan yakni organisasi Masyumi di ketuai oleh K.H. Hasyim Asy'ari.

K.H. Abdul Wahid Hasyim juga merupakan tokoh sentral di kalangan Umat Islam. K.H. Abdul Wahid Hasyim juga menjabat sebagai anggota Chuuo Sangi In yakni semacam DPR ala Jepang. Dengan jabatan tersebut K.H. Abdul Wahid Hasyim dapat menyakinkan tentara Jepang untuk mendirikan sebuah badan yang menghimpun kalangan ulama. Maka terbentuklah lembaga yang bernama Shumubu, yaitu lembaga Urusan Agama Islam yang susunannya terdiri dari: K.H. Hasyim Asy'ari selaku Ketua, K.H. Abdul Kahar Muzakir selaku Wakil Ketua I dan K.H. Abdul Wahid Hasyim selaku Wakil Ketua II.

Abdul Wahid Hasyim paham betul prinsip siyasah (politik) dalam Islam. Saat memimpin Partai Masyumi pada masa pendudukan Jepang, dia bisa bebas mengobarkan semangat merdeka. Lewat majalah Suara Muslimin Indonesia, terasa suara antipenjajahan, walau tidak langsung menohok Jepang. Pada edisi 15 Agustus 1944, misalnya, dimuat pidato ayahnya, K.H Muhammad Hasyim Asy'ari, di depan ulama se -Jawa di Bandung, 30 Juli 1944.

Peran Masyumi dalam Islam politik di Indonesia yang pertama adalah adalah sebagai sebuah mesin politik yang ingin merespon langsung keadaan revolusi yang sedang berjalan di Indonesia, sesuai dengan program

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perjuangan yang ditegaskan pada 17 Desember 1945, kemudian yang ke dua adalah Partai Masyumi sebagai organisasi yang memiliki ideologi Islam yang tidak mau bekerjasama dengan PKI, dan sangat keras menentang komunisme, bahkan Peran Masyumi waktu itu juga tidak terlepas dari dukungan dari ummat muslim dikarenakan ummat Islam telah memberikan andil yang besar dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dari belenggu penjajahan, baik perjuangan secara fisik maupun non fisik. Kemudian Maklumat Wakil Presiden telah memberikan angin segar bagi kalangan Islam untuk mewujudkan kembali keinginannya, sehingga golongan Islam membentuk suatu wadah Islam politiknya yaitu Masyumi melalui KUII pada tanggal 7-8 Nopember 1945, guna mewujudkan kembali tujuan Islam politiknya.

B. Saran

Penulis mengharapkan agar penulisan mengenai tokoh Islam maupun tokoh nasional lainnya tidak hanya sampai di sini, namun lebih dikembangkan lagi oleh penulis-penulis selanjutnya, karena penulisan biografi bisa dijadikan percontohan dan motivasi bagi pembaca. Kemudian, perlunya pemerintah untuk menjaga arsip-arsip agar terus bertahan, bahkan jangan sampai ada arsip yang hilang guna bahan riset di masa mendatang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Azyumardi Azra, Saiful Umam. 1998. *Menteri-menteri Agama RI: Biografi Sosial-Politik.* Jakarta: PPIM.

Aboebakar Atjeh. 2015. *Sejarah hidup K.H. Abdul Wahid Hasyim,* cet. Ke-1 Jombang: Pustaka Tebuireng.

Abu Muslim, "Poligami dan Poliandri: Kalau Orang Sakit Mau Jadi Dokter" *Aliran Islam,* Bandung, Th, V No. 30. Nopember 1951.

Abdul Azis Thaba, *Islam dalam Negara:* dalam Politik Orde Baru, Jakarta. Gema Insaai Press, 1996.

Ahmad Syafi'i Maarif, *Islam dan Masalah Kenegaraan*, 2006. LP3ES Universitas California 1985.

Artawijaya. 2014. *Belajar dari Partai Masyumi*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.

B. J. Bolan, *Pergumulan Islam di Indonesia 1945-1970,* (Jakarta: Grafiti), Lihat Maarif, *Islam dan Masalah Kenegaraan.*

Cholid Narbuko dan Abu Ahmadi. 2009. *Metodologi Penelitian* .Jakarta: Bumi Aksara.

Daliar Noer, 2000. *Partai Islam di Pentas Nasional: Kisah dan Analisis Perkembangan Politik Indonesia*, cetakan ke-2. Bandung: Mizan.

Herbert Feith, *Dynamics of Guided Democracy,* Ruth McVey (ed.). Indonesia, New Have: Southeast Asia Studies, Yale University, by Arragement With. Human Relations Area Files Press, 1963.

Katimin. 2007. *Islam Politik di Indonesia:Membuka tabir Perjuangan Islam Ideologis dalam Sejarah Politik Nasional,* Bandung: Cita Pustaka Media.

Muammar Himawan. 2004. *Pokok-Pokok Organisasi Modern*.Jakarta: Bina Ilmu.

Mestika Zed. 2004. *Metode Penelitian Kepustakaan* .Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Moch. Nurhasin. 2016. *Masa depan Partai Islam di Indonesa*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Musyrifah Sunanto. 2005.*Sejarah Peradaban Islam Indonesia*.Jakarta: Rajawali Pers.

Munawir Sjadzali. 1993. *Islam dan Tata Negara : ajaran sejarah dan pemikiran*. Jakarta: UI Press.

Munawar Ahmad. 2010. *Ijtihad Politik Gus Dur : Analisis Wacana Kritis.* Yogyakarta: LKiS.

Mohammad Rifai. 2014. *Biografi Singkat Wahid Hasyim [1914-1953]*, cet. ke-2 Yogyakarta: Garasi.

Natsir, *Islam sebagai Dasar Negara*, Bandung: Bulan Sabit, 1970.

Nur Rokhim. 2015. Kyai-Kyai Kharismatik & Fenomenal Yogyakarta: IRCiSoD.

Roeslan Abdulgani, unsur sekuler, dan Arnold Manonutu sebagai tokoh Kristen dalam PNI. Lihat *Tentang Dasar Negara di Majelis Konstituante*, Jilid I dan II, Bandung: Masa Baru, 1957.

Remy Madinier. 2013. *Partai Masjumi: Antara Godaan Demokrasi dan Islam Integral*. Bandung: Mizan.

Sutrisno Hadi, 1989. *Metodologi Research* .Yogyakarta: Andi Offset.

Soerjono Soekanto. 2002. *Sosiologi Suatu Pengantar*.Jakarta: Rajawalin Press.

Samsuri. *2004. Partai Islam Anti Komunis: Pergumulan Masyumi dan PKI di Arena Demokrasi Liberal*. Yogyakarta: Safira Insania Press.

Shalahuddin Hamid dan Iskandar Ahza. 2003. *Seratus Tokoh Islam, yang berpengaruh di Indonesia*. Jakarta: IntimedIa.

Tempo. 2011. Seri Tokoh Tempo: Wachid Hasyim Tokoh Islam Diawal Kemerdekaan. Jakarta: KPG Kepustakaan Populer GramedIa

Winarno Surakhman. 1994. *Pengantar Penelitian Ilmiah*. Bandung: Tarsito.

Yusril Ihza Mahendra, *"Prolog PRRI dan Keterlibatan Sjarifuddin - Natsir"*, dalam Endang Saifuddin Anshary (ed.), Pak Natsir 80 Tahun, jakarta. LP3ES, 1988.

Yuzril Ihza Mahendra, *Modernisme dan Fundamentalisme dalam politik islam.* Paramadina,1999.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Zamakhsyari Dhofier. 1987. *Tradisi Pesantren: Studi Tentang Pandangan Hidup Kyai*, Jakarta: LP3ES.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id